



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBNKITA

KINERJA DAN FAKTA | TRIWULAN I 2026



APBN Solid dan Berdaya Tahan

Mendorong Pertumbuhan, Meredam Gejolak

Foto: Pexels - Angke Widya



“

Fondasi ekonomi kita tidak berubah, bahkan akan jalan semakin cepat, karena kita akan semakin serius memperbaiki kendala-kendala perekonomian. Kita dorong ekonomi maju dengan lebih cepat sehingga masyarakat kita bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan”

Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa



Daftar Isi



- 5 **Ringkasan Eksekutif**
APBN tetap terus dijaga, sehat, adaptif, dan responsif melindungi perekonomian

Realisasi #UangKita

- 14 **Kinerja APBN**
Adaptif Menjaga Stabilitas dan Mendukung Agenda Prioritas
- 15 **Penerimaan Pajak**
Menguat di Tengah Stabilitas Ekonomi dan Upaya Reformasi Perpajakan Berkelanjutan
- 18 **Penerimaan Kepabeanan dan Cukai**
Tetap Resilien di Tengah Tekanan Perdagangan Global
- 21 **PNPB**
Performa Tangguh di Tengah Moderasi Harga Komoditas
- 24 **Belanja Pemerintah Pusat**
Mendukung Prioritas Nasional melalui Penguatan Kualitas Belanja

- 7 **Perkembangan Ekonomi Makro**
Resilien dan Stabil di Tengah Berbagai Dinamika

- 27 **Transfer ke Daerah**
Tetap Kuat Dukung Layanan Publik Daerah

- 30 **Anggaran Tematik**
Percepat Pembangunan

- 33 **Program Unggulan**
Meningkatkan Kualitas Akses Layanan Menyongsong Generasi Emas

- 35 **Pembiayaan Utang**
Pembiayaan Anggaran Terkendali, mendukung APBN yang Kredibel

- 38 **Pembiayaan Investasi**
Mendukung Program Ketahanan Pangan, Penguatan Sektor Lingkungan Hidup, serta Infrastruktur

- 10 **Kinerja Sektor Keuangan**
Stabilitas Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Global

Artikel Tematik

- 40 Akselerasi Penyaluran Tunjangan Hari Raya 2026 Perkuat Daya Beli dan Menjaga Momentum Ekonomi
- 41 Mengunci Ketidapatuhan, Membuka Penerimaan: Strategi *Automatic Blocking System* (ABS) dalam PNB
- 43 Bea Cukai dan BNN Bongkar Laboratorium Narkoba Tersembunyi di Bali, Tangkap Dua WNA Rusia
- 44 Coretax: Era Baru Administrasi Pajak yang Lebih Adil dan Transparan
- 46 Perempuan Mendominasi SBN Ritel

Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Kritik dan saran:



s.kemenkeu.go.id/saranAPBNKiTa

Pertanyaan tentang APBN KiTa:



s.kemenkeu.go.id/PPIDKemenkeuAPBNKiTa

Glosarium

ABS	: Automatic Blocking System	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	LDR	: Loan to Deposit Ratio
AS	: Amerika Serikat	LPG	: Liquefied Petroleum Gas
ASN	: Aparatur Sipil Negara	MBG	: Makan Bergizi Gratis
Bansos	: Bantuan Sosial	Migas	: Minyak dan Gas Bumi
BBM	: Bahan Bakar Minyak	MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
Binalavotas	: Pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas	MSCI	: Morgan Stanley Capital International
BMHP	: Bahan Medis Habis Pakai	NPL	: Non-Performing Loan
BN	: Belanja Negara	OIP	: Operator Investasi Pemerintah
BNN	: Badan Narkotika Nasional	PA	: Pembiayaan Anggaran
BK	: Bea Keluar	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
BLU	: Badan Layanan Umum	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
BM	: Bea Masuk	PDB	: Produk Domestik Bruto
BPD LH	: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	PE	: Pungutan Ekspor
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	Perpres	: Peraturan Presiden
BPP	: Belanja Pemerintah Pusat	PHTC	: Program Hasil Terbaik Cepat
BPS	: Badan Pusat Statistik	PIP	: Program Indonesia Pintar
bps	: basis points	PKH	: Program Keluarga Harapan
Bulog	: Badan Urusan Logistik	PMI	: Purchasing Managers Index
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah	PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan	PN	: Pendapatan Negara
BOPTN	: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
BPP	: Belanja Pemerintah Pusat	POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
ctc	: Cumulative to cumulative	PP	: Peraturan Pemerintah
CHT	: Cukai Hasil Tembakau	PPh	: Pajak Penghasilan
CKG	: Cek Kesehatan Gratis	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
CPO	: Crude Palm Oil	PPnBM	: Pajak Atas Penjualan Barang Mewah
DAK	: Dana Alokasi Khusus	PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Dana Otsus	: Dana Otonomi Khusus	PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
DBH	: Dana Bagi Hasil	PSN	: Proyek Strategis Nasional
DPK	: Dana Pihak Ketiga	RBC	: Risk-Based Capital
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
FTA	: Free Trade Agreement	SBN	: Surat Berharga Negara
HMA	: Harga Mineral Acuan	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
ICP	: Indonesia Crude Price	SDA	: Sumber Daya Alam
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan	SPM	: Surat Perintah Membayar
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank	SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
IKK	: Indeks Keyakinan Konsumen	SPT	: Surat Pemberitahuan
Inpres	: Instruksi Presiden	SUG	: Sekolah Unggul Garuda
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional	SUN	: Surat Utang Negara
KB	: Kurang Bayar	STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
KDKMP	: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	TAC	: Track Access Charge
KIP	: Kartu Indonesia Pintar	THR	: Tunjangan Hari Raya
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan	TKD	: Transfer Ke Daerah
KND	: Kekayaan Negara Dipisahkan	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
K3S	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama	TNKB	: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
K/L	: Kementerian/Lembaga	TPD	: Tunjangan Profesi Dosen
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	UST	: United States Treasury
		UU	: Undang-Undang
		WAY	: Weighted Average Yield
		ytd	: year to date
		yoy	: year on year

Ringkasan Eksekutif

APBN tetap terus dijaga

Sehat, Adaptif dan Responsif Melindungi Perekonomian

Sampai dengan 31 Maret 2026, APBN tetap dikelola secara ekspansif dan terkendali sebagai instrumen *shock absorber* untuk menopang stabilitas perekonomian sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlanjut. Dalam konteks tersebut, APBN tidak hanya berfungsi sebagai peredam gejolak, tetapi juga sebagai instrumen aktif untuk menggerakkan ekonomi domestik.

Di tengah tekanan global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia pada Triwulan I 2026 tetap tumbuh kuat sebesar 5,61% (yoy). Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas domestik tetap terjaga dan mesin pertumbuhan ekonomi bekerja dengan baik, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta akselerasi belanja Pemerintah pada awal tahun. APBN memainkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan tersebut melalui percepatan belanja negara, pelaksanaan program prioritas, perlindungan sosial, serta berbagai stimulus untuk menjaga daya beli, mobilitas, dan aktivitas usaha. Kinerja tersebut juga didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, tercermin dari inflasi Maret 2026 sebesar 3,48% (yoy), *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur yang tetap ekspansif pada level 50,1, pertumbuhan kredit 9,37% (yoy), serta cadangan devisa Februari 2026 yang memadai sebesar USD152 miliar.

Defisit APBN per 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB. Pada saat yang sama, keseimbangan primer masih berada pada level defisit Rp95,8

triliun, mencerminkan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif dan terjaga. Defisit tersebut merupakan bagian dari desain APBN yang secara terencana digunakan untuk mendorong akselerasi belanja negara pada awal tahun, terutama guna mendukung program prioritas dan memperkuat aktivitas ekonomi. Dengan demikian, defisit tidak mencerminkan tekanan fiskal, melainkan strategi yang terukur dan terkendali untuk menopang tahapan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.

Peran ekspansif APBN pada awal tahun terlihat nyata pada penguatan pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026. Akselerasi belanja Pemerintah, terutama melalui belanja pegawai, belanja barang, perlindungan sosial, serta dukungan program prioritas, memberikan dorongan langsung pada konsumsi, mobilitas, dan aktivitas usaha. Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi penggerak awal pertumbuhan dengan menciptakan permintaan, memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi, dan menjaga momentum ekspansi di berbagai wilayah.

Pendapatan Negara sampai dengan 31 Maret 2026 terealisasi sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% (yoy). Kinerja pendapatan negara tersebut didukung oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh positif, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, dinamika harga komoditas, serta penguatan pengelolaan penerimaan negara. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7% dari

target APBN dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun atau 20,2% dari target APBN. Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN.

Di sisi belanja, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4% (yoy). Akselerasi belanja ini menunjukkan peran APBN yang semakin kuat sebagai motor penggerak ekonomi pada awal tahun, terutama melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah untuk mendukung program prioritas bagi rakyat, menjaga daya beli, memperkuat layanan publik, dan mendorong aktivitas ekonomi di pusat maupun daerah. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp610,3 triliun atau 19,4% dari target APBN, sedangkan Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp204,8 triliun atau 29,5% dari target APBN.

Realisasi Pembiayaan Anggaran sampai akhir Triwulan I 2026 mencapai Rp257,4 triliun. Realisasi ini didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp258,6 triliun dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp25,2 triliun, serta penyaluran Pembiayaan Investasi sebesar Rp28,3 triliun.

Kinerja APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan perannya yang semakin kuat dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah dinamika global yang masih berlanjut, APBN mampu menjadi *shock absorber* dan memperkuat permintaan domestik, menjaga daya beli masyarakat, mendukung program prioritas, dan mengakselerasi perekonomian untuk tumbuh 5,61% pada Triwulan I 2026. Pemerintah terus menjaga efektivitas belanja, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memastikan pembiayaan anggaran dikelola secara hati-hati, adaptif, dan kredibel agar APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.



Perkembangan Ekonomi Makro

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid dengan stabilitas harga, aktivitas produksi yang tetap ekspansif, serta daya beli masyarakat yang terjaga. Berbagai tekanan eksternal mulai dari konflik geopolitik hingga volatilitas pasar keuangan terus diantisipasi melalui koordinasi kebijakan yang responsif, sehingga momentum pertumbuhan tetap terpelihara. Kondisi ini menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap resilien dan mampu menjadi penopang utama bagi keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika global.

Perkembangan Ekonomi Makro

Perkembangan Ekonomi Sepanjang Triwulan I 2026

Resilien dan Stabil di Tengah Berbagai Dinamika

Di awal 2026, kondisi perekonomian global masih diselimuti ketidakpastian. Eskalasi konflik geopolitik, ketidakpastian kebijakan perdagangan yang meningkat, serta volatilitas pasar keuangan menjadi isu sentral. Konflik fisik di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran sejak akhir Februari 2026 lalu masih terus berlanjut meningkatkan risiko gangguan jalur logistik strategis dunia, terutama dinamika penutupan Selat Hormuz. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga komoditas energi global serta makin meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan.

Naiknya tensi geopolitik mendorong harga minyak mentah dunia meningkat hingga ke level di atas USD100 per barel. Harga minyak mentah global mencapai titik USD118 per barel dan masih bertahan di kisaran yang relatif tinggi. Beberapa harga komoditas lainnya juga mengalami kenaikan, seperti batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO) yang naik hingga 15-25% (ytd) sebagai efek rambatan. Kondisi ini diteruskan pada perekonomian domestik dan memberikan tekanan APBN, terutama beban subsidi energi. Di sisi lain, terdapat efek natural hedge dari kenaikan harga komoditas ekspor unggulan yang menambah penerimaan negara. Akan tetapi, pada jalur moneter, kondisi ini dapat memicu tekanan nilai tukar Rupiah dan suku bunga sehingga meningkatkan *cost of fund*. Sektor riil juga berisiko tertekan akibat perlambatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan risiko inflasi yang dapat meningkatkan harga produksi dan menggerus daya beli. Menghadapi berbagai

tekanan tersebut, APBN terus bekerja sebagai *shock absorber* mengantisipasi tertransmisinya dampak negatif.

Aktivitas ekonomi global masih ditopang oleh sektor manufaktur yang ekspansif meskipun sebagian negara mulai menunjukkan perlambatan pada Triwulan I 2026. Sebagian besar negara maju dan negara berkembang termasuk Indonesia masih mencatatkan *trajectory* positif dalam 3 bulan awal 2026. Hal ini menjadi salah satu sinyal baik resiliensi ekonomi di tengah revisi ke bawah proyeksi perekonomian global dan revisi ke atas inflasi global. Menurut indikator ketahanan ekonomi yang dipublikasikan the Economist, Indonesia berada pada kelompok negara dengan eksposur rendah dengan tingkat sangga (*buffer*) yang memadai.

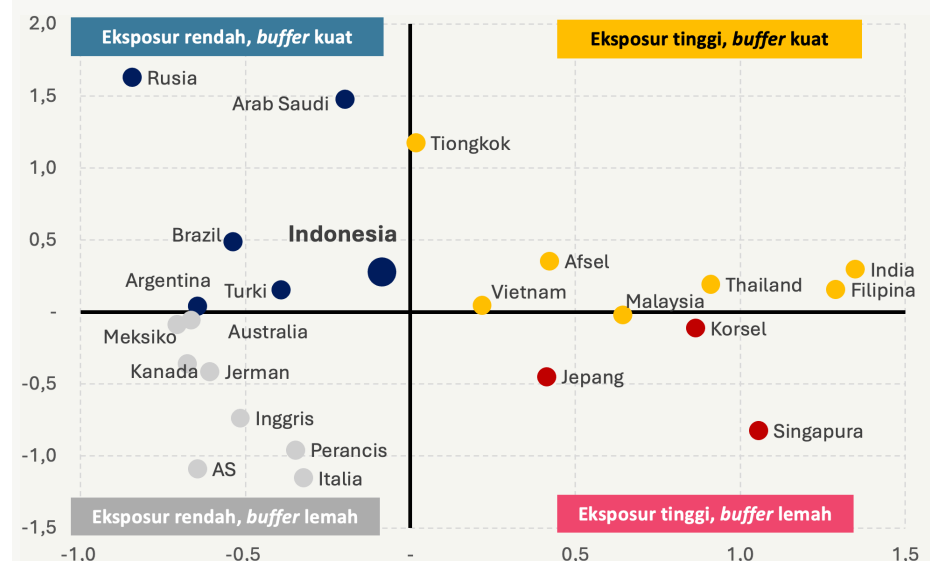
Ketahanan sektor eksternal Indonesia tercermin pada

berlanjutnya surplus neraca dagang selama 71 bulan secara berturut-turut hingga Maret 2026. Ekspor tetap tumbuh positif secara kumulatif pada Triwulan I mencapai 0,34% (ctc) atau sebesar USD66,8 miliar, merefleksikan daya saing yang terjaga. Sementara itu, pada periode yang sama, secara kumulatif, impor tumbuh 10,1% (ctc) atau sebesar USD61,3 miliar. Peningkatan didorong oleh bahan baku dan barang modal yang mengindikasikan ekspansi produksi dan investasi. Berdasarkan struktur aktivitas produksi dan investasi, kinerja impor tersebut diperkirakan berpotensi membuka peluang bagi peningkatan ekspor.

Di sisi lain, situasi global memberikan tekanan pada kinerja pasar keuangan domestik. Kondisi nilai tukar Rupiah serta kenaikan *yield* obligasi menandai risiko pada pasar keuangan. Meskipun demikian, sentimen risiko mulai terlihat mereda pada April, sebagaimana tecermin pada aliran modal masuk yang mencatatkan *inflow* hingga akhir April.

Ketahanan ekonomi nasional tidak terlepas dari koordinasi kebijakan yang terus diperkuat guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

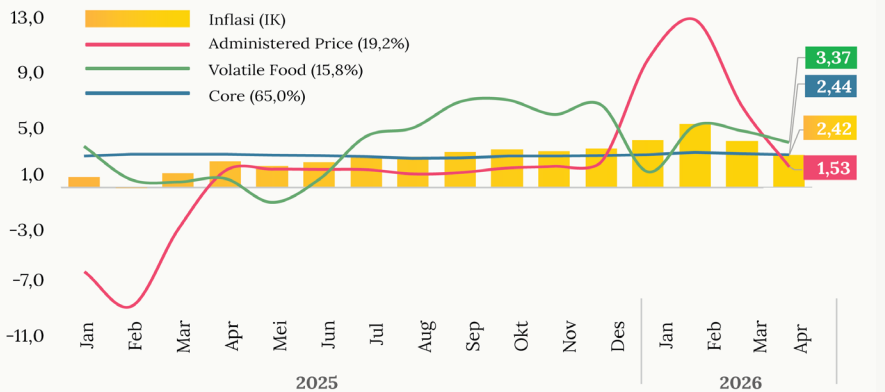
Ketahanan Indonesia atas tekanan gangguan energi global relatif kuat di G20-ASEAN



Sumber: metodologi the Economist, CEIC, TradeMap, World Bank (diolah)

Perkembangan Inflasi dan Komponen (%yoy)

Sumber: BPS, diolah



Strategi fiskal, termasuk penempatan dana Pemerintah di perbankan terus dikoordinasikan dengan strategi moneter untuk mendukung likuiditas. Upaya ini turut mendorong peredaran uang sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit dan menggerakkan sektor riil. Pertumbuhan kredit hingga Maret 2026 masih tumbuh sebesar 9,49% dengan suku bunga kredit yang terus turun sehingga menopang aktivitas bisnis korporasi dan konsumsi rumah tangga. Hingga Maret 2026, suku bunga kredit tertimbang turun hingga 8,76% dari angka sebelum penempatan dana pada Agustus 2025 sebesar 9,12%. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya untuk memperkuat transmisi likuiditas ke sektor riil.

Stabilitas ekonomi nasional juga dicerminkan oleh kinerja stabilitas harga yang terjaga. Tingkat inflasi nasional kembali pada rentang target $2,5 \pm 1\%$ meskipun di tengah dinamika global serta momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi April 2026 mencapai 2,42% (yoy), mulai melandai setelah dipengaruhi *base effect* sepanjang Triwulan I lalu. Perlambatan signifikan terjadi pada komponen harga diatur Pemerintah (*administered price*) karena hilangnya dampak *base effect* kebijakan diskon listrik awal 2025. Penurunan inflasi komponen ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar subsidi guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, terkendalinya inflasi

pangan pada level 3,37% (yoy) juga turut menjaga stabilitas inflasi nasional. Berbagai kebijakan intervensi harga pangan dan operasi pasar, penguatan produksi dan cadangan pangan, pengawasan distribusi, serta komunikasi kebijakan pengendalian inflasi yang efektif terus konsisten dilakukan guna menjaga akses pangan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Daya beli terus dijaga tetap tumbuh, dicerminkan oleh inflasi inti yang bergerak pada kisaran 2,44% (yoy). Tekanan harga emas yang mulai menurun mendorong sedikit perlambatan. Jika mengecualikan pergerakan harga emas perhiasan, inflasi April 2026 diestimasi mencapai 1,71% (yoy), naik dari bulan sebelumnya didorong oleh tetap tumbuhnya permintaan, terutama pada masa Ramadan dan Idulfitri.

Aktivitas ekonomi domestik masih menunjukkan perbaikan didukung oleh menguatnya optimisme masyarakat dan stabilitas harga. Pada Triwulan

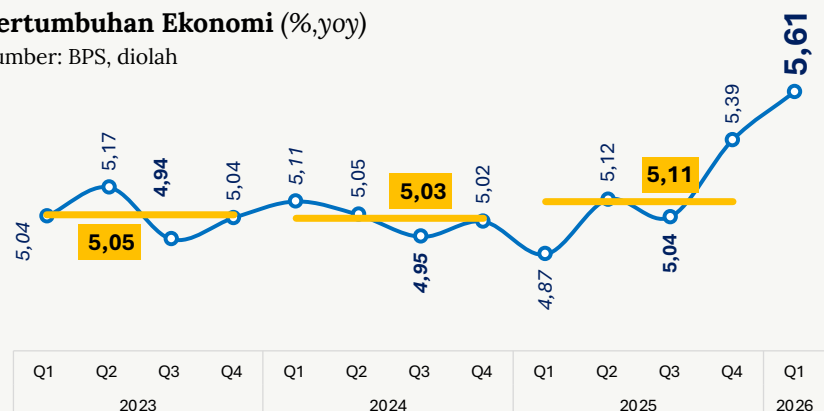
I 2026, perekonomian nasional tumbuh mencapai 5,61% (yoy) didorong oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, dan percepatan belanja Pemerintah. Tren positif ini terjadi di semua kawasan, baik Jawa maupun non-Jawa. Momentum Ramadan dan Idulfitri menjelang akhir Triwulan I 2026 juga mendorong geliat aktivitas ekonomi masyarakat. Stimulus dan bantuan sosial Pemerintah juga turut menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Penguatan ini terlihat tidak hanya pada sumber-sumber pertumbuhan utama, tetapi juga pada sebarannya antarwilayah serta dampaknya terhadap pasar kerja.

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 tersebut juga menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan domestik bekerja semakin merata. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan utama berasal dari Konsumsi Rumah Tangga, PMTB, dan Konsumsi Pemerintah, sejalan dengan menguatnya aktivitas masyarakat, investasi yang tetap berjalan, serta dukungan belanja negara pada awal tahun. Dari sisi produksi, pertumbuhan terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi, yang menunjukkan aktivitas ekonomi riil tetap bergerak kuat di tengah dinamika global.

Secara spasial, pertumbuhan yang berlangsung luas di seluruh wilayah Indonesia ini mencatatkan bahwa Jawa, Bali & Nusa Tenggara, serta Sulawesi tumbuh di atas rata-rata nasional. Bali & Nusa Tenggara bahkan menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi. Di saat yang sama, penguatan

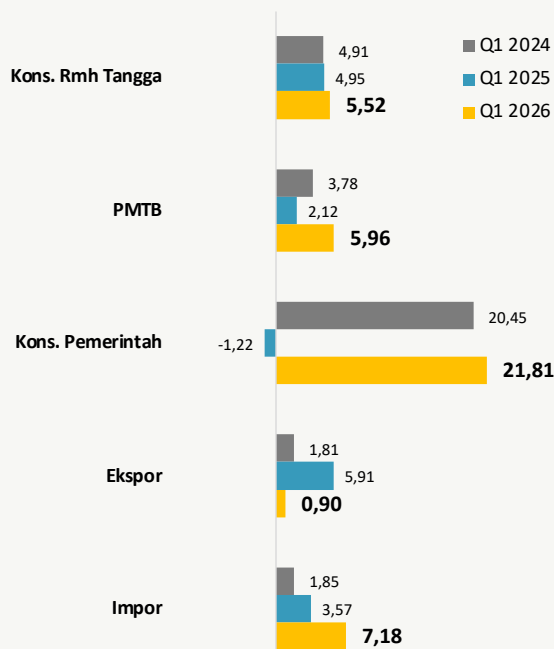
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)

Sumber: BPS, diolah



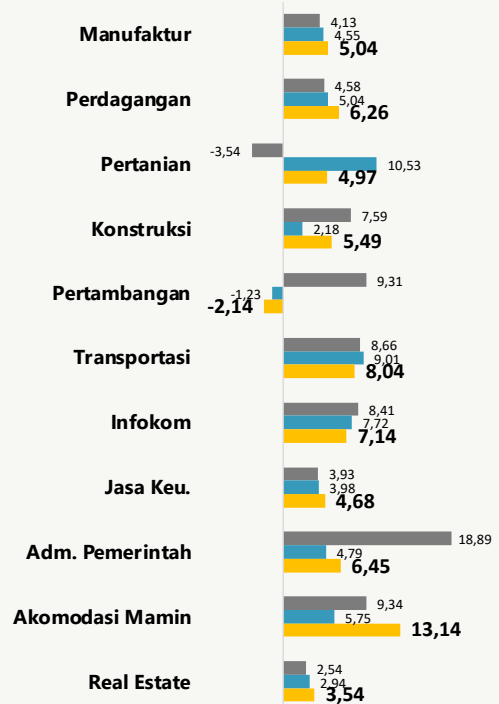
Pertumbuhan Komponen Pengeluaran (%yoy)

Sumber: BPS, diolah



Pertumbuhan Komponen Produksi (%yoy)

Sumber: BPS, diolah



Sulawesi menunjukkan dukungan sektor-sektor basis komoditas dan industri pengolahan di luar Jawa yang semakin penting dalam menopang pertumbuhan nasional. Perkembangan ini mengindikasikan penguatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di satu kawasan, tetapi mulai menyebar lebih luas seiring menguatnya mobilitas, pariwisata, konsumsi, dan aktivitas produksi di berbagai daerah.

Tingkat permintaan domestik yang kuat tecermin dari tumbuhnya Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 5,52% (yoy). Konsumsi masyarakat dan mobilitas tumbuh kuat tecermin dari naiknya penjualan ritel menjelang Idulfitri. Persepsi positif juga masih terlihat dari keyakinan konsumen atas ekonomi dan kepercayaan kepada Pemerintah yang masih bertahan kuat. Beberapa program prioritas Pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga turut berkontribusi dalam menjaga daya beli melalui penciptaan lapangan kerja dan dukungan ekosistem aktivitas ekonomi.

Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga tumbuh tinggi mencapai 21,81% (yoy), didorong oleh akselerasi

Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Percepatan Belanja Negara ini diupayakan untuk mendorong agar pola belanja lebih cepat dan merata sehingga berefek lebih kuat dalam rangka mendorong aktivitas dunia usaha.

Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi yang tumbuh kuat sebesar 5,96% (yoy) juga menopang tumbuhnya perekonomian pada Triwulan I 2026. Peran Danantara dan sektor swasta semakin diperkuat, terutama dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional. Sebanyak 13 proyek hilirisasi telah mulai dilakukan oleh Danantara. Perbaikan iklim investasi terus didorong dengan penyelesaian hambatan perizinan dan investasi.

Dari sisi produksi, permintaan domestik yang kuat dan kebijakan hilirisasi menopang tumbuhnya Sektor Industri Pengolahan mencapai 5,04% (yoy). Sektor Perdagangan juga tumbuh 6,26% (yoy) didorong oleh aktivitas belanja masyarakat. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 4,97% didorong oleh produksi tanaman pangan yang melimpah seiring panen raya. Sementara itu, masa Ramadan dan Idulfitri mendorong tumbuhnya Sektor

Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing sebesar 8,04% dan 13,14%. Arus mudik menjadi pendorong utama karena meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada permintaan jasa transportasi dan hunian akomodasi.

Tumbuh kuatnya ekonomi pada Triwulan I 2026 diikuti oleh penciptaan lapangan kerja. Kinerja ketenagakerjaan yang positif terlihat dari naiknya penciptaan lapangan kerja pada Februari 2026, mencapai 1,9 juta orang (naik dibandingkan angka Februari 2025). Selain itu, angka pengangguran menurun 35 ribu orang, menjadi 7,24 juta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,68%, turun dari 4,76% pada Februari 2025. Penyerapan tenaga kerja terbesar didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penguatan aktivitas ekonomi tidak hanya terlihat pada angka pertumbuhan, tetapi juga penciptaan tambahan kesempatan kerja, terutama pada sektor-sektor utama yang selama ini menjadi penopang produksi dan permintaan domestik.

Kinerja Sektor Keuangan

Kinerja Sektor Keuangan Triwulan I 2026

Stabilitas Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Global

Pada Triwulan I 2026, sektor keuangan Indonesia sempat dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan dinamika kebijakan eksternal. Meningkatnya ketidakpastian global dipicu oleh konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran serta sejumlah kebijakan perdagangan dari AS. Selain itu, pasar keuangan global kembali dihadapkan pada kondisi suku bunga yang cenderung bertahan tinggi lebih lama (*higher for longer*). Hal ini dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa konflik geopolitik mendorong kenaikan inflasi global sekaligus menahan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran juga menjadi perang energi yang menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas utama seperti minyak dan batu bara.

Namun demikian, dampaknya terhadap pasar keuangan domestik relatif moderat dan mulai mereda pada April, didukung koordinasi kebijakan yang kuat serta fundamental ekonomi yang tetap terjaga dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tekanan global sempat tercermin pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah, dan pasar obligasi domestik pada Triwulan I 2026. Namun, dampak tersebut relatif moderat dan mulai mereda memasuki April, tercermin dari perbaikan aliran modal asing, spread Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap kompetitif, serta stabilitas sektor perbankan yang tetap kuat. Sementara itu, kinerja sektor perbankan tetap solid, sehingga masih mampu

menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan baik. Gejolak global lebih banyak memengaruhi sentimen jangka pendek pasar, sedangkan fondasi sektor keuangan domestik tetap terjaga.

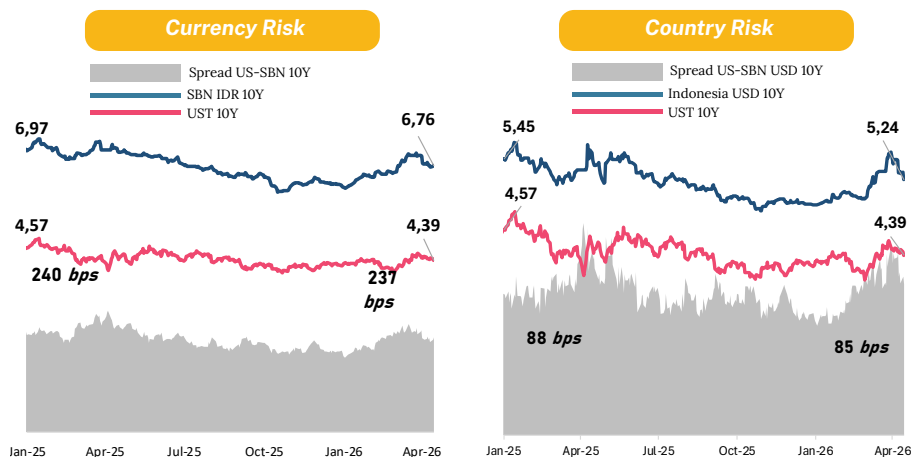
IHSG yang menembus rekor penutupan tertinggi (*all-time high*) pada tanggal 20 Januari 2026 di level 9.134,7, sempat mengalami tekanan namun perlahan kembali

pulih. Sepanjang Triwulan I 2026 IHSG mengalami koreksi seiring meningkatnya sentimen *risk-off global* dan faktor domestik, yang menunjukkan kehati-hatian investor di tengah gejolak global pada Triwulan I. Namun, aktivitas perdagangan saham pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026 menunjukkan peningkatan, terlihat dari kenaikan nilai dan volume transaksi harian IHSG. Memasuki April, pasar melakukan *repricing* terhadap risiko geopolitik terlihat dengan kembali masuknya aliran modal asing, meskipun pasar saham masih mencatat *outflow* yang antara lain dipengaruhi transaksi negosiasi korporasi pada Maret.

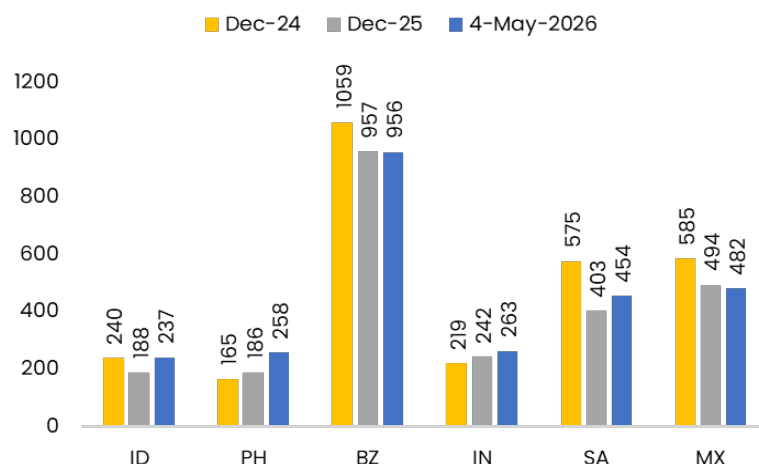
Nilai tukar Rupiah pada Triwulan I 2026 bergerak dinamis mengikuti penguatan dolar AS

Currency Risk dan Country Risk Terkelola

Sumber: Bloomberg, Kemenkeu, Bank Indonesia, diolah per 4 Mei 26

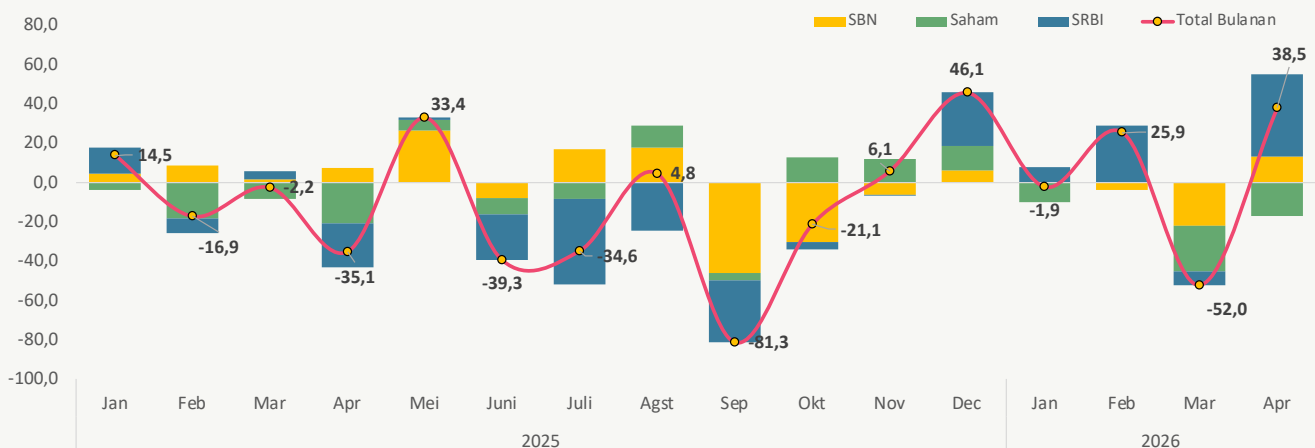


Yield Spread LCY vs US Treasury 10Y (YTD, bps)



Aliran Modal Asing (Rp Triliun)

Sumber: Bloomberg, Kemenkeu, Bank Indonesia per 4 Mei 2026



dan meningkatnya ketidakpastian global. Pergerakan nilai tukar Rupiah relatif sejalan dengan mata uang negara berkembang lain. Perkembangan ini ditandai oleh tren penguatan indeks dolar (DXY Index) di tengah meningkatnya ketidakpastian global, serta ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed. Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, utamanya dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang Amerika Serikat-Israel dan Iran, serta keluarnya arus modal dari negara-negara *emerging market*.

Pasar SBN cukup resilien, meskipun *yield* SBN sempat meningkat pada Triwulan I 2026 seiring penyesuaian investor terhadap risiko global dan domestik. Namun, memasuki akhir April, tekanan tersebut mulai mereda, tercermin dari *yield* SBN 10 tahun yang berada di 6,76% (*eop*) atau 6,45% (*ytd*), serta *spread* terhadap UST yang turun ke sekitar 237 bps untuk SBN Rupiah dan 85 bps untuk SBN valas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa *currency risk* dan *country risk* Indonesia tetap terkelola dengan baik dan terjaganya pasar SBN sebagai sumber pembiayaan yang stabil dalam mendukung pengelolaan APBN secara kredibel.

Pada Triwulan I 2026, arus modal asing sempat mencatatkan *outflow* seiring meningkatnya sentimen *risk-off* global. Namun, kondisi

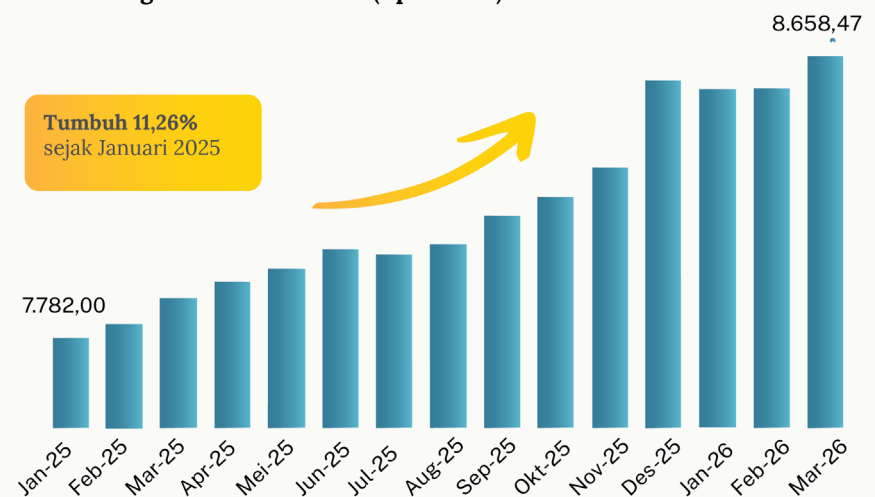
tersebut berbalik membaik pada April yang mencatatkan *inflow* Rp38,5 triliun, sehingga secara akumulatif sampai 30 April 2026 tercatat *inflow* Rp10,4 triliun. Hal ini didorong oleh *inflow* di bulan April pada SBN sebesar Rp13,4 triliun dan SRBI sebesar Rp42,2 triliun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat investor terhadap aset keuangan domestik kembali menguat seiring meredanya tekanan global. Perbaikan indikator pasar pada April memperkuat sinyal bahwa tekanan global lebih bersifat sementara dan dapat dikelola dengan baik melalui bauran kebijakan yang tepat.

Kinerja sektor perbankan menunjukkan fundamental yang tetap solid dengan pertumbuhan yang positif dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Di tengah gejolak global, sektor perbankan

tetap menjadi jangkar stabilitas dan penopang pertumbuhan. Hingga Februari 2026, kredit masih tumbuh 9,37% (*yoy*), DPK meningkat 13,18% (*yoy*), likuiditas tetap memadai, dan kualitas aset terjaga dengan NPL gross sebesar 2,17%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik dan mendukung pembiayaan sektor riil, serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang masih tetap tinggi.

Likuiditas yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) melanjutkan tren pelonggaran setelah penyaluran tahap ketiga likuiditas Pemerintah sebesar Rp100 triliun pada Maret ke sektor perbankan. Pada Februari 2026, LDR berada pada level 84,72% atau bergerak lebih longgar dibandingkan bulan Desember 2025 sebesar 85,35% dan bulan Januari

Perkembangan Kredit Nasional (Rp Triliun)



2026 sebesar 84,93%. Capaian ini melanjutkan pelonggaran di bawah 85% sejak bulan September 2025. Lebih lanjut, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL *gross*) stabil di 2,17%, menegaskan bahwa risiko kredit masih terkendali. Secara keseluruhan, perkembangan indikator menunjukkan bahwa kinerja perbankan nasional masih solid dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan kredit nasional terus menunjukkan tren yang positif dan menjadi salah satu indikator penting terdaganya fungsi intermediasi perbankan. Total kredit nasional telah meningkat dari Rp7.782,0 triliun pada awal 2025 menjadi Rp8.658,47 triliun pada Maret 2026, atau tumbuh 11,26% sejak Januari 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbankan tetap aktif menyalurkan pembiayaan ke perekonomian, sejalan dengan membaiknya sentimen usaha, meningkatnya kebutuhan pembiayaan, dan tetap terdaganya permintaan domestik. Dengan tren pertumbuhan tersebut, sektor perbankan terus memperkuat perannya dalam mendukung ekspansi sektor riil dan

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik..

Secara sektoral, pertumbuhan kredit tetap ditopang sektor-sektor utama yang terkait langsung dengan aktivitas produksi dan konsumsi domestik, terutama manufaktur, konstruksi, pertanian, serta perdagangan. Kredit sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap total kredit nasional, yaitu sebesar 20,7%, dengan pertumbuhan sebesar 7,2% (yoy), menandakan ekspansi aktivitas industri yang tetap solid. Sementara itu, sektor konstruksi dan sektor pertanian berturut-turut mencatat pertumbuhan yang pesat sebesar 34,9% (yoy) dan 15,5% (yoy). Di sisi lain, sektor keuangan dan asuransi serta sektor retail dan perdagangan besar tumbuh lebih moderat sebesar 5,3% (yoy) dan 3,8% (yoy), mencerminkan konsumsi domestik yang masih kuat.

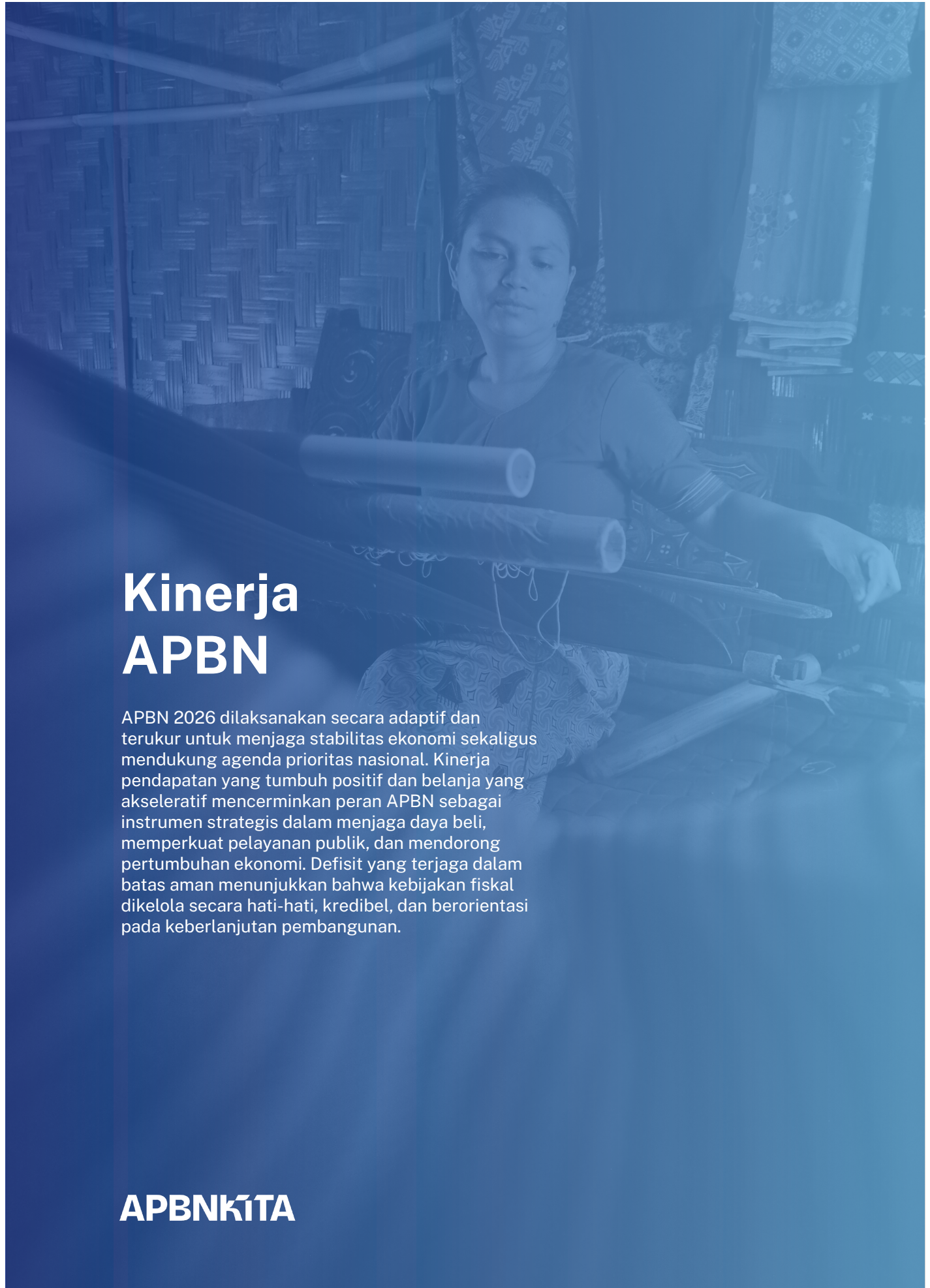
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), industri asuransi juga menunjukkan ketahanan yang baik, dengan rasio kecukupan modal jauh di atas ambang minimum regulator. Kondisi ini memperkuat ketahanan sistem keuangan domestik secara keseluruhan di tengah dinamika global. Rasio Kecukupan Modal (RBC) tercatat tinggi, yaitu sebesar

327,9% untuk asuransi umum dan 480,8% untuk asuransi jiwa, atau jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan regulator, yaitu sebesar 120%. Kinerja positif ini juga memperlihatkan perbaikan tata kelola risiko dan meningkatnya kinerja asuransi pada awal 2026.

Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk memastikan dampak lanjutan dari dinamika global tetap termitigasi dengan baik. Sampai dengan awal Mei 2026, berbagai indikator menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar keuangan domestik mulai mereda, terlihat dari kembalinya arus modal asing, *spread* SBN yang tetap kompetitif, serta risiko nilai tukar dan risiko negara yang tetap terkelola. Di saat yang sama, sektor perbankan dan industri keuangan nasional tetap menunjukkan ketahanan yang baik, dengan likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, dan intermediasi yang terus berjalan. Dengan fondasi tersebut, sektor keuangan Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Foto: Rahmat Andriansa



Kinerja APBN

APBN 2026 dilaksanakan secara adaptif dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda prioritas nasional. Kinerja pendapatan yang tumbuh positif dan belanja yang akseleratif mencerminkan peran APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Defisit yang terjaga dalam batas aman menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dikelola secara hati-hati, kredibel, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.

APBNKITA

Kinerja APBN

Kinerja APBN Triwulan I 2026

Adaptif Menjaga Stabilitas dan Mendukung Agenda Prioritas

APBN 2026 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Sampai dengan 31 Maret 2026, realisasi APBN Triwulan I 2026 menunjukkan kinerja APBN yang tetap solid dan progresif. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp574,9 triliun,

18,2% APBN, tumbuh 10,5% (yoy). Pendapatan Negara pada Triwulan I 2026 antara lain terdiri atas penerimaan Perpajakan mencapai Rp462,7 triliun, tumbuh 14,3% (yoy), terdiri dari penerimaan Pajak Rp394,8 triliun, serta Kepabeanan dan Cukai Rp67,9 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp112,1 triliun; dan penerimaan Hibah Rp0,1 triliun. Sementara itu, di sisi Belanja Negara mencapai Rp815,0 triliun, 21,2% APBN, tumbuh 31,4% (yoy).

Realisasi ini terbagi menjadi: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat Rp610,3 triliun, terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp281,2 triliun (34,5% total belanja negara Triwulan I) dan Belanja non-K/L Rp329,1 triliun (40,4%); dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun (25,1% total belanja negara Triwulan I). Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, APBN tercatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB (periode yang sama tahun 2025 defisit Rp99,8 triliun atau 0,41% PDB). Sementara itu, Keseimbangan primer tercatat defisit Rp95,8 triliun (periode yang sama 2025 surplus Rp21,9 triliun). Di sisi pembiayaan anggaran, telah terealisasi Rp257,4 triliun (37,3% APBN).

Realisasi APBN Triwulan I 2026

Pendapatan Negara

Rp574,9 Triliun

18,2%
%APBN

Belanja Negara

Rp815,0 Triliun

21,2%
%APBN

Defisit APBN

Rp240,1 Triliun

0,93%
%PDB

Uraian (triliun rupiah)

	2025				2026			
	APBN	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	520,4	17,3	(17,5)	3.153,6	574,9	18,2	10,5
I. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	404,7	16,2	(14,5)	2.693,7	462,7	17,2	14,3
1. Penerimaan Pajak	2.189,3	327,0	14,9	(18,8)	2.357,7	394,8	16,7	20,7
2. Kepabeanan & Cukai	301,6	77,6	25,7	9,8	336,0	67,9	20,2	(12,6)
II. PNBP	513,6	115,6	22,5	(26,3)	459,2	112,1	24,4	(3,0)
III. Penerimaan Hibah	0,6	0,1	19,2	(72,5)	0,7	0,1	17,2	2,8
B. BELANJA NEGARA	3.621,3	620,3	17,1	1,4	3.842,7	815,0	21,2	31,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	413,2	15,3	(3,4)	3.149,7	610,3	19,4	47,7
1. Belanja K/L	1.160,1	196,1	16,9	(11,8)	1.510,5	281,2	18,6	43,4
2. Belanja non-K/L	1.541,4	217,2	14,1	5,7	1.639,2	329,1	20,1	51,5
II. Transfer Ke Daerah	919,9	207,1	22,5	12,3	693,0	204,8	29,5	(1,1)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	21,9	(34,6)	(83,5)	(89,7)	(95,8)	106,8	(537,7)
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	(616,2)	(99,8)	16,2	(632,2)	(689,1)	(240,1)	34,8	140,5
% thd PDB	(2,53)	(0,41)			(2,68)	(0,93)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	252,5	41,0	194,8	689,1	257,4	37,3	1,9

Penerimaan Pajak

Kinerja Penerimaan Pajak

Menguat di Tengah Stabilitas Ekonomi dan Upaya Reformasi Perpajakan Berkelanjutan

Pada awal 2026, penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang positif. Pertumbuhan tahunan sempat mencapai 30,7% (yoy) pada Januari sebelum melandai ke 20,7% (yoy) hingga Maret. Secara nominal, penerimaan pajak Triwulan I mencapai Rp394,8 triliun atau 16,7% dari target.

Secara sekilas, capaian tersebut menunjukkan adanya akselerasi signifikan dalam aktivitas ekonomi domestik. Namun, perlu dicermati bahwa kinerja penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor administratif, seperti pengembalian pajak/restitusi yang mengurangi penerimaan bruto. Penurunan nilai pengembalian pajak akan berdampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan penerimaan pajak.

Dari sisi bruto, penerimaan pajak tumbuh 9,9% (yoy), jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Angka pertumbuhan yang lebih moderat ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap tumbuh stabil di tengah ketidakpastian global. Kinerja tersebut menjadi sinyal positif bagi kondisi fiskal nasional, sekaligus menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam

menjaga stabilitas penerimaan. Dominasi serta pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mencerminkan konsumsi rumah tangga yang cukup terjaga. Kondisi ini sejalan dengan keyakinan konsumen yang optimis terhadap kondisi ekonomi, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia yang konsisten di atas 100 sepanjang Triwulan I 2026.

PPN dan PPnBM masih menjadi penopang utama penerimaan pajak dengan kontribusi 37,6% dan tumbuh signifikan, 57,7% (yoy) secara neto dan 17,2% (yoy) secara bruto sepanjang Triwulan I 2026. Secara lebih rinci, kinerja tersebut ditopang oleh PPN Dalam Negeri dan PPN Impor dengan kontribusi masing-masing 44,2% dan 52,1% yang menunjukkan peran kuat, baik dari aktivitas ekonomi domestik maupun perdagangan internasional.

Kinerja ini tidak terlepas dari momentum hari besar keagamaan nasional yang serentak terjadi pada periode yang sama, yaitu Tahun Baru Imlek pada Januari serta Hari Suci Nyepi dan Idulfitri pada Maret. Umumnya, aktivitas ekonomi mulai meningkat pada momen persiapan

hari besar, terutama transaksi antar pelaku usaha sehingga sebagian dampak terhadap penerimaan pajak mulai tercermin pada Triwulan I. Namun, efek yang lebih besar diperkirakan akan terlihat pada April atau triwulan berikutnya, mengingat adanya jeda waktu antara puncak konsumsi masyarakat dan pelaporan/pembayaran pajak.

Selain didukung oleh daya beli masyarakat yang masih kuat, penerimaan PPN dan PPnBM khususnya PPN Impor juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Dipicu oleh konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran serta kenaikan harga minyak mentah global, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mendekati Rp17.000/USD. Nilai impor dalam rupiah menjadi meningkat. Dalam jangka pendek, kondisi ini berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Pada Triwulan I 2026, PPN Impor tercatat tumbuh 15,4% (yoy) sejalan dengan peningkatan nilai impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Indonesia secara kumulatif hingga Maret 2026 tumbuh 10,1% (yoy) yang ditopang oleh peningkatan impor barang modal, bahan baku, maupun barang konsumsi.

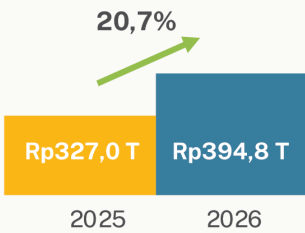
Meskipun pelemahan rupiah saat ini masih memberikan dorongan positif terhadap penerimaan PPN Impor, Pemerintah tetap mewaspadaai potensi dampak lanjutan terhadap perekonomian. Dalam jangka menengah hingga panjang, depresiasi yang berkelanjutan berisiko menekan

Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I 2026

Penerimaan Pajak Triwulan I 2026 Tumbuh Kuat 20,7% (yoy)

16,7% dari APBN 2026		
PPh Badan	Rp43,3 T	5,4%▲
PPh Orang Pribadi & PPh 21	Rp61,3 T	15,8%▲
PPh Final, PPh 22, & PPh26	Rp76,7 T	5,1%▲
PPN & PPnBM	Rp155,6 T	57,7%▲
Lainnya	Rp57,9 T	-5,7%▼

Realisasi Neto Triwulan I 2026



Pertumbuhan pajak yang kuat terutama pada PPN & PPnBM serta PPh dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta semakin baiknya implementasi Coretax

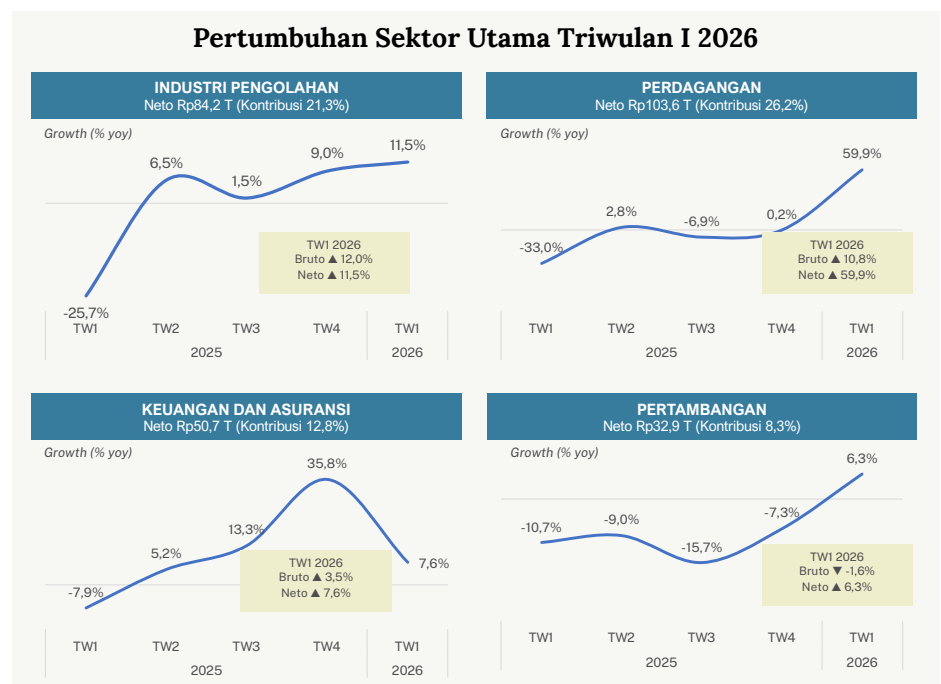
daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.

Sejalan dengan kuatnya konsumsi domestik yang tercermin pada kinerja PPN, penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Khususnya, PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi yang secara keseluruhan tumbuh 15,8% (yoy). Hal ini didukung oleh kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil.

Penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah pada awal tahun menunjukkan perbaikan yang tercermin dari peningkatan jumlah penduduk bekerja serta rata-rata upah/gaji. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 naik 1,89 juta orang dibandingkan Februari 2025. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh bertambahnya pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 0,56 juta orang, serta pekerja bebas di nonpertanian sebesar 0,28 juta orang. Di sisi lain, rata-rata upah/gaji meningkat dari Rp3,09 juta menjadi Rp3,29 juta per bulan.

Pajak penghasilan atas transaksi perdagangan dalam dan luar negeri juga tumbuh positif. PPh Final, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 26 secara agregat berkontribusi 19,4% terhadap penerimaan pajak dan mengalami pertumbuhan 5,1% (yoy). Di antara jenis pajak tersebut, hanya PPh Pasal 26 yang masih berkontraksi seiring penurunan pemotongan pajak penghasilan atas dividen kepada wajib pajak luar negeri.

Dari sisi penghasilan usaha, PPh Badan tumbuh 5,4% (yoy) secara netto didukung penurunan restitusi dan peningkatan setoran pada mayoritas sektor usaha terutama manufaktur dan perdagangan. Secara bruto, PPh Badan berkontraksi 1,2% (yoy), utamanya disebabkan oleh penurunan penerimaan dari sektor pertambangan tembaga akibat bencana tanah longsor yang menghambat operasional. Namun, penurunan ini hanya terjadi di kelompok tertentu saja, sementara sebagian besar sektor usaha lainnya



masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.

Pertumbuhan penerimaan pajak pada Triwulan I 2026 bersifat *broad based*, meluas lintas sektor. Tidak hanya ditopang oleh satu sektor, tetapi kombinasi dari sektor perdagangan, industri, dan aktivitas jasa serta infrastruktur. Hal ini mencerminkan bahwa tidak hanya aktivitas konsumsi domestik yang solid, tetapi produksi juga terjaga.

Pada Triwulan ini, sektor Perdagangan mencatatkan pertumbuhan penerimaan yang sangat signifikan. Penurunan restitusi serta kenaikan penerimaan dari sektor perdagangan besar bahan bakar serta perdagangan *online* menjadi pengungkit kinerja sektoral. Pertumbuhan pajak pada perdagangan besar bahan bakar mengindikasikan aktivitas distribusi energi yang lebih tinggi, seiring dengan konsumsi bahan bakar yang turut mencerminkan terjaganya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Stabilitas harga bahan bakar dalam negeri juga turut mendukung daya beli.

Penerimaan pajak dari pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercatat tumbuh signifikan, terutama setoran atas pemungutan PPN. Hal ini sejalan dengan konsumsi digital dan belanja online yang kuat, terlebih lagi efek musiman dari hari besar keagamaan.

Pada sektor Industri pengolahan, pertumbuhan penerimaan pajak hampir terjadi di seluruh lini usaha, hampir 70% dari populasi bidang usaha. Hal ini sejalan dengan PMI Indonesia yang ekspansif selama delapan bulan terakhir. Penopang kenaikan penerimaan terbesar berasal dari industri minyak dan lemak nabati, industri barang kimia, dan industri pengolahan tembakau.

Sama halnya dengan industri pengolahan, kinerja positif juga terjadi hampir di seluruh bidang sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Kontributor pertumbuhan terbesar berasal dari subsektor aktivitas penunjang jasa keuangan, seperti bursa efek dan perantara pedagang efek. Selain itu, subsektor pegadaian konvensional dan asuransi jiwa konvensional juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sementara itu, subsektor lainnya mengalami pertumbuhan yang moderat.

Sektor Pertambangan secara netto tercatat tumbuh positif. Namun, kinerja ini lebih besar dipengaruhi oleh penurunan restitusi pajak. Penurunan restitusi yang signifikan pada subsektor pertambangan batu bara turut menopang kinerja netto secara keseluruhan. Sementara itu, penerimaan secara bruto masih berkontraksi tipis akibat tekanan dari subsektor pertambangan tembaga.

Penguatan Tata Kelola dan Administrasi Perpajakan

Di tengah proses penghimpunan penerimaan pajak, Pemerintah menjaga dan memastikan integritas dan akuntabilitas sumber daya manusia serta proses bisnis perpajakan selalu berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan, mulai dari pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penagihan perpajakan. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan demi peningkatan penerimaan pajak yang berkeadilan.

Upaya perbaikan terhadap performa dan stabilitas sistem Coretax Ditjen Pajak (DJP) juga terus dilakukan. Kelancaran proses pelaporan dan pembayaran pajak

relatif lebih baik dibandingkan pada masa awal implementasi tahun sebelumnya. Secara bertahap, penguatan sistem administrasi perpajakan tersebut turut mendukung optimalisasi penerimaan pajak, baik melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun efisiensi proses bisnis administrasi perpajakan.

Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak pada awal 2026 mencerminkan kondisi ekonomi yang membaik. Pertumbuhan pada sisi neto merupakan hasil dari kombinasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan restitusi, dan perbaikan administrasi

perpajakan. Di sisi lain, faktor musiman juga mulai memberikan dorongan sejak awal tahun, meskipun dampak utamanya akan lebih terasa pada periode berikutnya.

Dengan demikian, perkembangan ini menunjukkan fase pemulihan yang berlangsung stabil walaupun di tengah ketidakpastian global. Penerimaan pajak yang kuat pada awal tahun memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah untuk mendorong percepatan belanja, khususnya pada program prioritas nasional. Daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi diharapkan dapat tetap terjaga



Foto: Muh. Khaidir Usman

Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Kinerja Kepabeanaan dan Cukai Mulai Menguat di Awal 2026

Surplus Perdagangan Mencerminkan Ketahanan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

Hingga Triwulan I 2026, penerimaan Kepabeanaan dan Cukai mencapai Rp67,9 triliun, atau 20,2% APBN. Capaian ini berkontraksi 12,6% (yoy), dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Cukai dan Bea Keluar (BK) meskipun penerimaan Bea Masuk (BM) masih mencatat pertumbuhan.

Secara bulanan, penerimaan Kepabeanaan dan Cukai pada awal tahun 2026 masih mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi relatif lebih dalam terjadi pada Januari dan Februari. Namun demikian, pada Maret mulai terlihat adanya perbaikan dengan kontraksi yang semakin terbatas. Perkembangan ini sejalan dengan pola penerimaan cukai yang menjadi kontributor terbesar dalam struktur penerimaan Kepabeanaan dan Cukai.

Cukai tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 73,2% dari total penerimaan Kepabeanaan dan Cukai. Hingga Maret 2026, penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp51,0 triliun, berkontraksi 11,2% (yoy) atau mencapai 20,9%

dari target APBN. Penerimaan terbesar berasal dari Cukai Hasil Tembakau (HT) sebesar Rp48,8 triliun dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp2,1 triliun.

Cukai HT berkontraksi 12,4% (yoy), namun diperkirakan akan membaik pada Triwulan II. Kontraksi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau pada akhir tahun 2025. Selain itu, pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai oleh pelaku usaha juga memengaruhi realisasi penerimaan. Faktor lainnya adalah libur Idulfitri tahun 2026 yang jatuh pada Triwulan I sehingga mengurangi jumlah hari kerja. Kinerja penerimaan diperkirakan akan membaik pada Triwulan II seiring dengan perbaikan kinerja produksi barang kena cukai serta normalisasi dampak penundaan dan dampak libur lebaran.

Secara bulanan, penerimaan cukai pada awal tahun 2026 masih mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi relatif lebih dalam terjadi pada Januari dan Februari. Namun demikian,

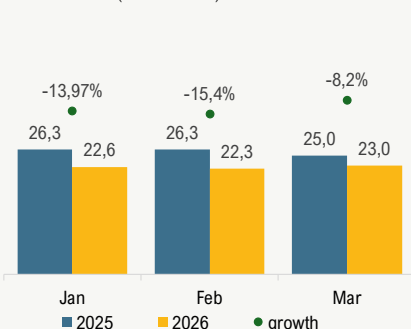
pada Maret mulai terlihat adanya perbaikan sebagai indikasi adanya perbaikan kinerja penerimaan.

Karakteristik penerimaan Cukai HT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi. Penerimaan juga dipengaruhi oleh mekanisme pemesanan dan pelunasan pita cukai oleh industri, termasuk pemanfaatan fasilitas penundaan pelunasan. Dengan mekanisme tersebut, realisasi penerimaan pada suatu periode tidak selalu mencerminkan tingkat produksi pada periode yang sama, karena turut dipengaruhi oleh pola pemesanan pita cukai serta waktu pelunasan oleh pelaku usaha.

Berbeda dengan Cukai HT, penerimaan Cukai MMEA menunjukkan kinerja yang lebih positif. Hingga Maret 2026, penerimaan Cukai MMEA mencapai Rp2,1 triliun atau tumbuh 28,5% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri yang mencapai 26,9% karena peningkatan permintaan.

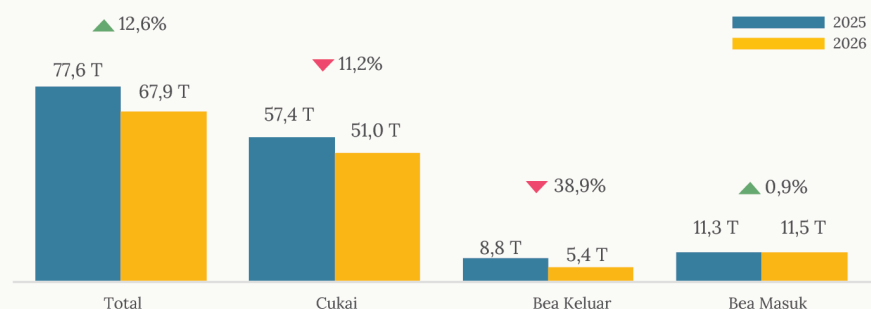
Kebijakan cukai pada prinsipnya tidak hanya berorientasi pada fungsi fiskal atau *budgetair* sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjalankan fungsi *regulerend* dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai. Oleh karena itu, penerapannya dirancang secara seimbang dengan tetap mempertimbangkan aspek pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri dan tenaga kerja, serta penguatan pengawasan.

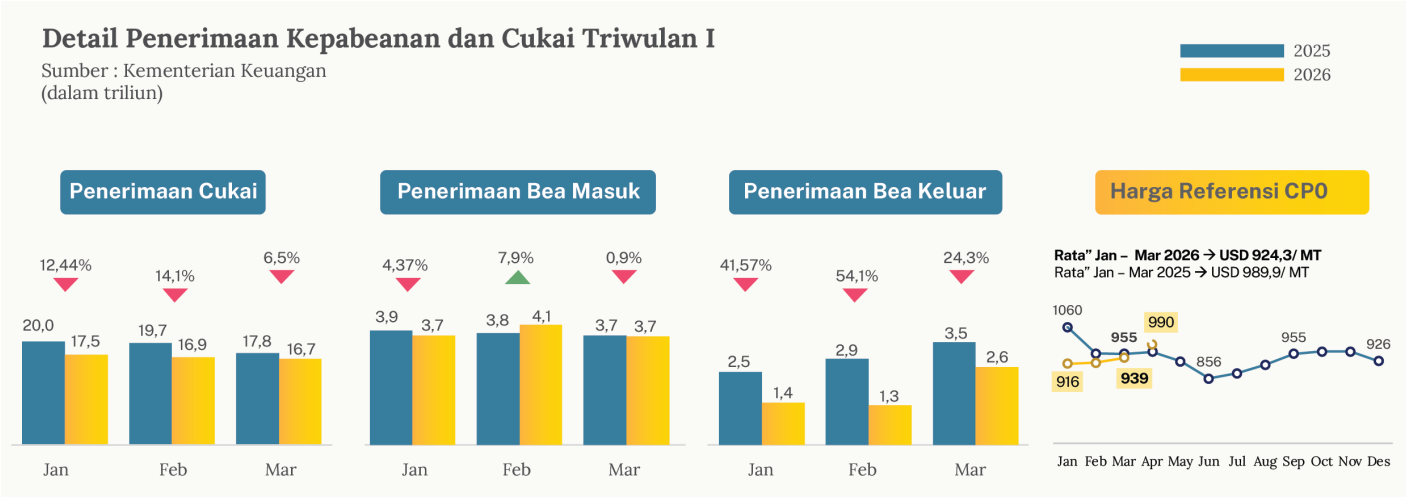
Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Triwulan I
Sumber: DJBC (dalam triliun)



Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai 2025-2026

Stabil di tengah volatilitas harga komoditas dan gejolak perdagangan global





Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

Kinerja perdagangan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Kondisi global sebelumnya diwarnai oleh meningkatnya fragmentasi perdagangan serta perang tarif antar negara besar. Tekanan kembali meningkat seiring eskalasi

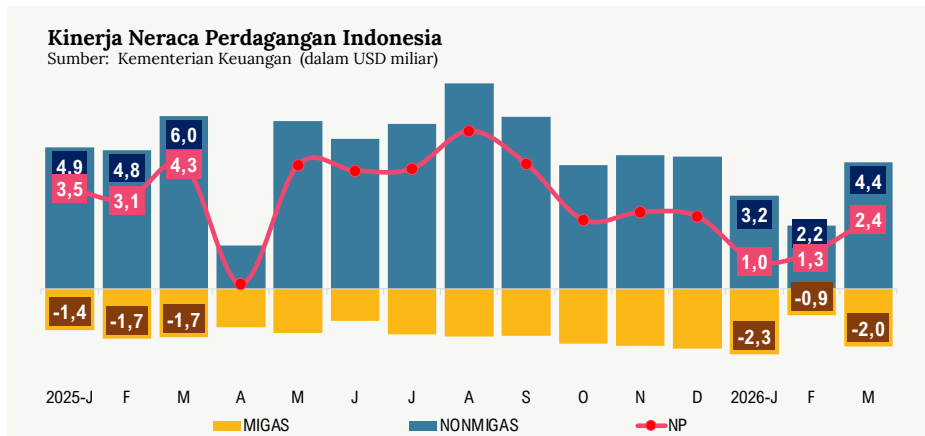
mengalami kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya impor energi, terutama kenaikan harga komoditas energi di pasar global.

Kinerja ekspor kumulatif mencapai USD66,7 miliar atau tumbuh 0,2% (yoy). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor nonmigas, khususnya dari komoditas logam termasuk produk baja, batu bara, dan produk CPO yang masih menunjukkan ketahanan di tengah

sebelumnya. Pada bulan tersebut, neraca perdagangan mencatat surplus USD2,4 miliar, didorong oleh surplus neraca nonmigas sebesar USD4,4 miliar, sementara neraca migas masih mencatat defisit USD2,0 miliar. Nilai ekspor tercatat USD22,4 miliar dan impor mencapai USD20,0 miliar. Meskipun terjadi perlambatan dibandingkan periode Maret 2025, capaian ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan eksternal Indonesia masih mampu bertahan di tengah ketidakpastian global.

Kinerja ekspor Maret 2026 terutama didorong oleh ekspor ke Tiongkok yang ditopang komoditas logam dasar nonbesi dan bijih tembaga, sejalan dengan meningkatnya ekspor mineral olahan hasil hilirisasi. Selain itu, ekspor ke Jepang meningkat untuk menjaga pasokan energi terutama dari komoditas batu bara dan gas alam. Di sisi lain, ekspor ke Amerika Serikat tercatat menurun terutama pada komoditas pakaian rajut, konveksi, dan sepatu olahraga seiring melemahnya permintaan akibat tekanan proteksionisme perdagangan.

Meskipun neraca perdagangan masih mencatat surplus, perkembangan kinerja perdagangan perlu tetap dicermati. Pertumbuhan impor yang relatif lebih tinggi dibandingkan ekspor menunjukkan adanya potensi tekanan terhadap neraca perdagangan apabila tren tersebut berlanjut dalam beberapa periode ke depan. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan serta penguatan kinerja ekspor dan pengelolaan impor secara seimbang agar stabilitas neraca perdagangan tetap terjaga.



konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi. Dalam kondisi tersebut, kebijakan hilirisasi yang diiringi penguatan fasilitas perdagangan, perbaikan layanan, serta pengawasan yang efektif berperan dalam menjaga stabilitas kinerja ekspor dan impor nasional menghadapi tekanan eksternal.

Kinerja neraca perdagangan Indonesia hingga Maret 2026 secara kumulatif masih mencatat surplus sebesar USD4,6 miliar. Surplus tersebut terutama ditopang oleh kinerja neraca nonmigas, sementara neraca migas mengalami defisit. Adapun defisit migas tersebut

konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran dan fragmentasi perdagangan global.

Di sisi lain, impor tercatat USD62,1 miliar, meningkat 11,5% (yoy). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan impor nonmigas yang didorong oleh komoditas panel surya, komputer dan alat komunikasi, mesin, serta bahan baku plastik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan permintaan domestik masih terus berlanjut.

Surplus neraca perdagangan pada Triwulan I terutama ditopang oleh kinerja pada Maret 2026 yang mencatatkan surplus terbesar dibandingkan bulan-bulan

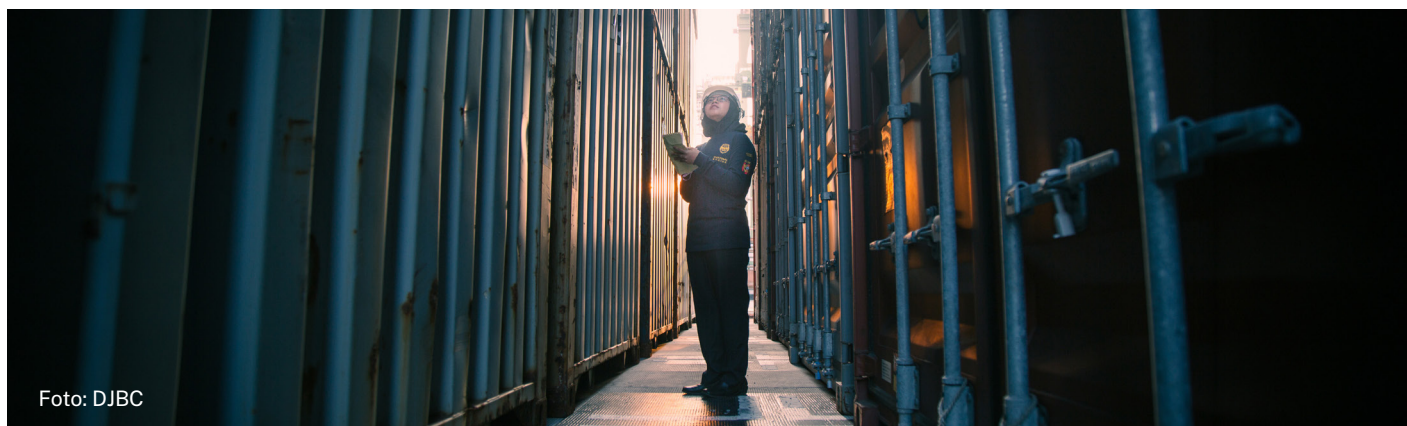


Foto: DJBC

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kinerja PNBP Triwulan I Tetap Terjaga

Performa Tangguh di Tengah Moderasi Harga Komoditas

Menutup periode tiga bulan pertama di tahun 2026, kinerja PNBP tetap menunjukkan daya tahan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan pergerakan harga komoditas yang masih berfluktuasi. Secara nominal, realisasi PNBP mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN. Namun, untuk melihat gambaran yang lebih utuh, kinerja PNBP perlu dibaca tidak hanya dari angka total, tetapi juga dari komposisi pembentuknya. Apabila Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak diperhitungkan, PNBP pada Triwulan I 2026 justru tumbuh 7,0% (yoy). Ini menunjukkan bahwa secara *underlying*, kinerja PNBP tetap menguat, ditopang oleh komponen-komponen utama seperti SDA, PNBP K/L, dan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan kata lain, kontraksi total PNBP lebih banyak dipengaruhi faktor nonberulang, bukan pelemahan menyeluruh pada basis penerimaan negara.

Penguatan tersebut terutama tercermin pada komponen-komponen utama di luar Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang tetap mencatat pertumbuhan positif. PNBP SDA Nonmigas mencapai Rp35,1 triliun atau 24,4% dari target APBN, tumbuh 7,1% (yoy). Kinerja ini memperlihatkan bahwa di tengah tekanan pada sebagian komoditas global, penerimaan berbasis sumber daya alam nonmigas masih mampu tumbuh karena didukung kombinasi faktor harga, kebijakan, dan aktivitas produksi. Peningkatan pendapatan terutama berasal dari SDA Minerba, seiring implementasi PP Nomor 19 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak April 2025, serta kenaikan Harga Mineral Acuan (HMA)

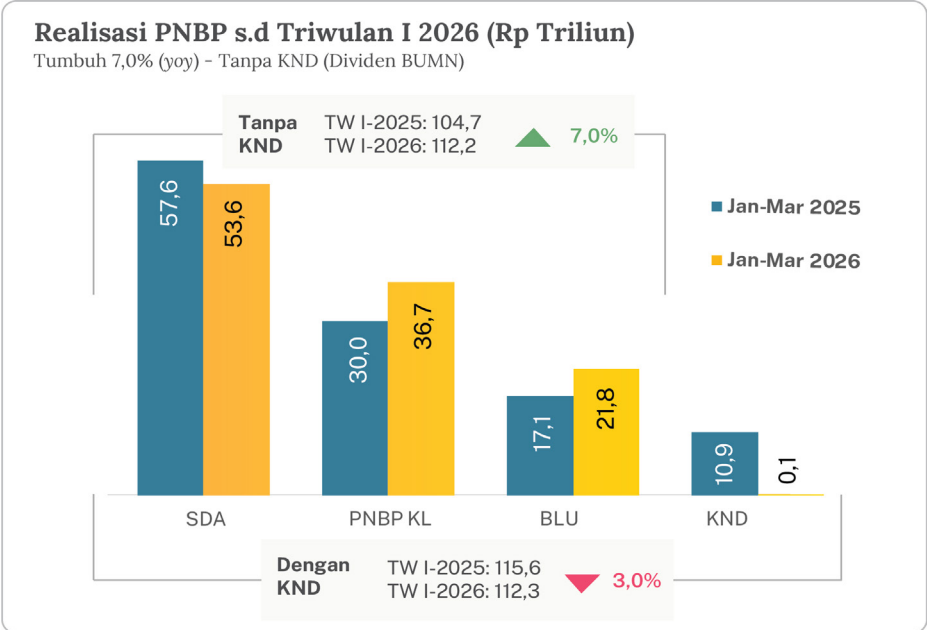
pada komoditas utama seperti nikel, tembaga, emas, dan perak. Dinamika ini sejalan dengan perkembangan pasar logam global yang pada April 2026 juga mencatat penguatan harga nikel dan logam lainnya di tengah prospek defisit pasokan serta meningkatnya kebutuhan industri.

Secara lebih rinci, PNBP SDA Minerba sebesar Rp32,6 triliun atau 24,4% APBN tumbuh 6,2% (yoy). Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan efek implementasi kebijakan tarif, tetapi juga memperlihatkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara ketika aktivitas industri dan permintaan mineral strategis tetap berjalan. Di luar Minerba, PNBP SDA Kehutanan sebesar Rp1,9 triliun atau 31,6% APBN tumbuh 27,4% (yoy), terutama dari peningkatan pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan nonkehutanan. PNBP SDA Kelautan dan Perikanan sebesar Rp0,2 triliun atau 14,0% APBN tumbuh 9,7% (yoy), didorong peningkatan volume

produksi ikan yang didaratkan. Sementara itu, PNBP SDA Panas Bumi sebesar Rp0,3 triliun atau 12,3% APBN tumbuh 2,3% (yoy) seiring meningkatnya pendapatan iuran produksi panas bumi. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini menunjukkan bahwa basis PNBP nonmigas cukup beragam dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.

Selain dari sumber daya alam, PNBP K/L juga mencatat kinerja yang kuat dengan realisasi Rp36,7 triliun atau 37,4% dari target APBN, tumbuh 22,0% (yoy). Ini menunjukkan bahwa penguatan penerimaan negara juga datang dari sisi layanan, administrasi, penegakan hukum, dan pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan premium atas SBN sebesar Rp4,86 triliun, serta meningkatnya pendapatan sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan sebesar Rp1,02 triliun. Dengan demikian, PNBP K/L tidak hanya mencerminkan penerimaan administratif, tetapi juga menunjukkan penguatan tata kelola negara, baik dari sisi pengelolaan kas dan surat berharga negara maupun dari sisi penegakan hukum.

Kontributor utama lainnya pada PNBP K/L juga memperlihatkan



Realisasi PNBP Triwulan I 2026

Total PNBP	24,4%
Rp112,1 Triliun	%APBN
Pendapatan SDA	20,5%
Rp53,6 Triliun	%APBN
Pendapatan KND	3,1%
Rp0,1 Triliun	%APBN
Pendapatan PNBP Lainnya	37,4%
Rp36,7 Triliun	%APBN
Pendapatan BLU	22,2%
Rp21,8 Triliun	%APBN

PNBP
(Triliun Rupiah)

	2025			2026			
	APBN	Real s.d. 31 Mar	% yoy	APBN	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN	% yoy
Total PNBP	513,6	115,6	(26,3)	459,2	112,1	24,4	(3,0)
A Pendapatan SDA	259,7	57,6	(7,0)	261,2	53,6	20,5	(6,9)
B Pendapatan KND	90,0	10,9	(74,6)	1,8	0,1	3,1	(99,5)
C Pendapatan PNBP Lainnya	86,0	30,0	(12,3)	97,9	36,7	37,4	22,0
3 Pend. PNBP K/L	86,0	30,0	(12,3)	97,9	36,7	37,4	22,0
D Pendapatan BLU	77,9	17,1	(4,3)	98,3	21,8	22,2	27,3
1 Pend. Kelapa Sawit	13,3	3,3	(21,1)	26,1	6,7	25,7	101,4
2 Pend. Non Kelapa Sawit	64,7	13,8	0,9	72,2	15,1	20,9	9,4

bahwa penerimaan negara tumbuh dari aktivitas yang dekat dengan keseharian ekonomi masyarakat dan layanan publik. Pendapatan dari jasa komunikasi dan informatika, penggunaan spektrum frekuensi radio, layanan keimigrasian, jasa kepelabuhanan, konsesi transportasi, hingga pendapatan kepolisian menunjukkan bahwa basis penerimaan negara semakin tersebar dan ditopang oleh aktivitas ekonomi yang nyata. Kontribusi 10 K/L dan BUN dengan target terbesar bahkan mencapai sekitar 72,6% dari total realisasi PNBP K/L 2026, yang menunjukkan peran kuat institusi-institusi utama negara dalam menopang kinerja PNBP pada awal tahun.

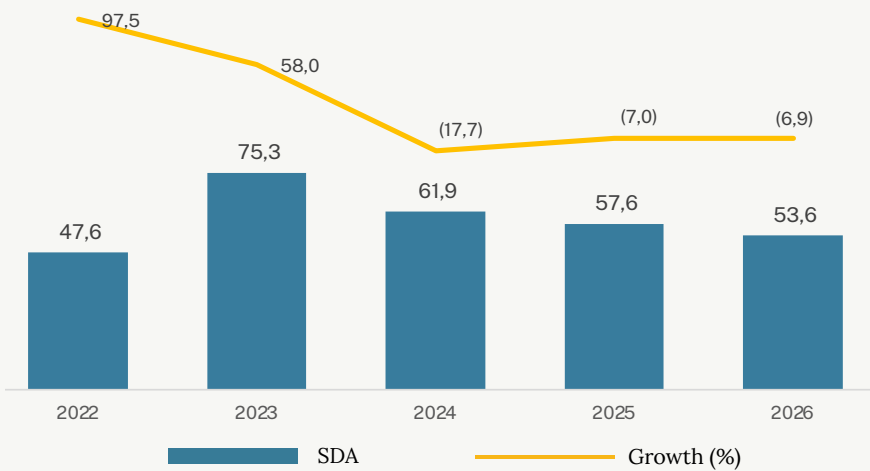
Dari sisi BLU, pendapatan juga mengindikasikan penguatan dengan realisasi Rp21,8 triliun atau 22,2% APBN, tumbuh 27,3% (yoy). Kinerja ini terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kementerian Kesehatan serta kenaikan tarif Pungutan Ekspor (PE) CPO sawit dan turunannya. Hal ini memperlihatkan bahwa BLU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen layanan, tetapi juga mampu menjadi sumber penerimaan yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan sektor unggulan. Kenaikan tarif melalui PMK Nomor 30 Tahun 2025 dan PMK Nomor 9 Tahun 2026 turut memperkuat pendapatan BLU pada awal tahun. Perkembangan ini juga sejalan dengan arah kebijakan sawit nasional yang mengarah pada kenaikan pungutan ekspor untuk mendukung penguatan

program biodiesel domestik. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan BLU dari sawit bukan hanya efek tarif, tetapi juga bagian dari penyesuaian kebijakan energi dan hilirisasi yang lebih luas.

Di tengah penguatan tersebut, pendapatan KND tercatat sebesar Rp0,1 triliun atau 3,1% APBN, turun 99,5% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan tidak berulangnya setoran dividen interim BUMN Perbankan, di mana pada Januari 2025 terdapat setoran dividen interim dari BRI sebesar Rp10,9 triliun. Karena itu, penurunan KND lebih tepat dibaca sebagai dampak *base effect* yang tinggi pada tahun sebelumnya. Penjelasan ini penting agar pembacaan terhadap PNBP tidak bias: kontraksi total bukan menunjukkan pelemahan menyeluruh, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh tidak berulangnya komponen yang bersifat satu kali.

Di sisi lain, PNBP SDA Migas sebesar Rp18,6 triliun atau 15,8% APBN. Kinerja ini terutama dipengaruhi penurunan *Indonesia Crude Price (ICP)* dan *lifting* minyak bumi, serta perubahan kebijakan atas *split* bagi hasil pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Pertamina Hulu Energi Rokan. Rata-rata ICP periode Desember 2025–Februari 2026 tercatat lebih rendah 10,3% (yoy), sementara *lifting* minyak bumi lebih rendah 2,0% (yoy). Dengan demikian, kinerja pada PNBP migas pada Triwulan I lebih banyak mencerminkan kondisi harga dan volume produksi pada awal tahun. Namun, perkembangan global setelah Maret tetap perlu dicermati karena lanskap energi internasional berubah cepat. Pada April–Mei 2026 tercatat harga minyak kembali bergerak naik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan risiko gangguan pasokan melalui jalur

Pendapatan Sumber Daya Alam
(Rp Triliun)



strategis energi. Menimbang hal ini, meskipun Triwulan I masih menunjukkan pelemahan, ruang perbaikan penerimaan dari sektor migas tetap terbuka apabila dinamika harga energi global berlanjut dan dapat dikelola secara tepat.

Ke depan, dinamika geopolitik global terus dicermati karena dapat memengaruhi kinerja pendapatan SDA, baik dari sisi

migas maupun komoditas mineral. Namun, perkembangan tersebut juga membuka peluang tambahan bagi penerimaan negara ketika direspons dengan kebijakan yang adaptif dan penguatan tata kelola penerimaan yang konsisten. Dalam konteks ini, kinerja PNBP Triwulan I 2026 memberi pesan yang cukup kuat bahwa di tengah tekanan global, basis penerimaan negara di luar KND tetap tumbuh, komponen

nonmigas tetap menopang, PNBP K/L dan BLU terus menguat, serta ruang penguatan tetap terbuka dari perkembangan komoditas ke depan. Dengan dasar tersebut, Pemerintah terus mengoptimalkan potensi penerimaan negara agar PNBP tetap menjadi salah satu penopang penting APBN dalam mendukung pembangunan dan menjaga ketahanan fiskal.



Foto: Firdan Fahmi

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Mendukung Prioritas Nasional melalui Penguatan Kualitas Belanja

Dalam mendukung pembangunan nasional, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Tahun Anggaran 2026 diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan dampak yang semakin nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi,” BPP dirancang untuk memperkuat kualitas belanja melalui peningkatan efektivitas layanan publik, penguatan daya ungkit pertumbuhan ekonomi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana prioritas, akselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Dengan arah seperti ini, BPP ditempatkan bukan semata sebagai instrumen pengeluaran, tetapi sebagai alat kebijakan yang menghubungkan

prioritas pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.

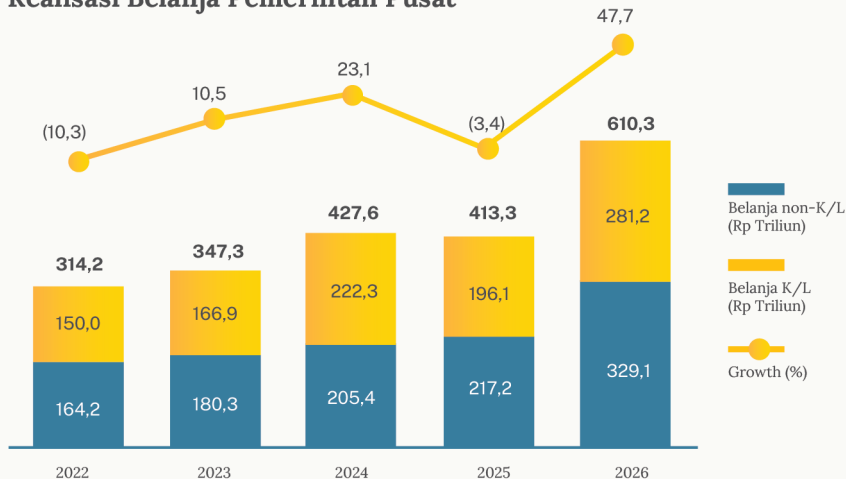
Arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam dukungan pembiayaan bagi berbagai program prioritas Pemerintah. BPP digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi, mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui keberlanjutan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, memperluas layanan kesehatan masyarakat, mendukung pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, memperkuat pertahanan dan keamanan rakyat semesta, hingga mendorong akselerasi investasi dan perdagangan global. Dengan cakupan yang luas ini, BPP pada dasarnya menjadi simpul penghubung antara agenda pembangunan jangka menengah Pemerintah dengan kebutuhan stabilisasi dan penguatan ekonomi pada awal tahun anggaran.

Pada Triwulan I 2026, realisasi BPP turut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama pelaksanaan MBG dan penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Sampai dengan 31 Maret 2026, realisasi BPP mencapai Rp610,3 triliun atau 19,4% APBN, meningkat 47,7% (yoy). Capaian tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp281,2 triliun dan Belanja Non-K/L sebesar Rp329,1 triliun. Besarnya realisasi pada awal tahun ini menunjukkan bahwa APBN bergerak lebih cepat dalam menopang pelaksanaan program prioritas dan memberi dorongan awal yang lebih kuat bagi aktivitas ekonomi domestik.

Dalam mendukung program Pemerintah, layanan publik, dan pembangunan yang langsung dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, APBN hadir melalui alokasi Belanja K/L. Hingga Triwulan I 2026, realisasi Belanja K/L mencapai Rp281,2 triliun atau 18,6% APBN, tumbuh 43,4% (yoy), terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan MBG dan penyaluran bansos. Kinerja ini menunjukkan bahwa Belanja K/L pada awal tahun tidak hanya menopang kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga semakin diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan penguatan aktivitas ekonomi.

Dari sisi komponennya, Belanja Pegawai K/L pada Triwulan I 2026 terealisasi sebesar Rp97,1 triliun atau 27,1% APBN, tumbuh 22,2% (yoy). Kenaikan ini antara lain dipengaruhi oleh pengangkatan 355 ribu ASN baru serta realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) Non-PNS. Belanja ini terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp63,5 triliun serta tunjangan kinerja sebesar Rp33,6 triliun. Dalam lingkup

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat



yang lebih luas, belanja pegawai tidak hanya berfungsi menjaga keberlangsungan birokrasi, tetapi juga memastikan agar layanan negara di berbagai sektor tetap berjalan dengan baik, terutama ketika Pemerintah tengah mempercepat pelaksanaan program prioritas pada awal tahun.

Sementara itu, Belanja Barang K/L mencapai Rp111,1 triliun atau 15,7% APBN, tumbuh sangat tinggi sebesar 114,6% (yoy), yang utamanya dipengaruhi oleh penyaluran MBG. Belanja ini dimanfaatkan antara lain untuk MBG bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, insentif biodiesel, layanan kesehatan, layanan keamanan dan keselamatan bidang lalu lintas, penyaluran BOS, stabilisasi harga pangan, pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kenaikan yang sangat kuat pada pos ini menunjukkan bahwa pada Triwulan I, BPP memang difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan belanja yang paling cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memberi dukungan langsung pada konsumsi, pelayanan, dan aktivitas ekonomi.

Adapun Belanja Modal terealisasi sebesar Rp35,4 triliun atau 12,5% APBN, tumbuh 36,7% (yoy). Kinerja ini terutama dipengaruhi oleh dukungan terhadap konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan dan irigasi. Belanja modal tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, pengadaan peralatan dan mesin, serta pengadaan gedung dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tetap menjaga kesinambungan pembangunan aset produktif, sehingga percepatan belanja tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat produktivitas dalam jangka menengah.

Di sisi lain, Belanja Bansos pada Triwulan I 2026 mencapai Rp37,4 triliun atau 23,0% APBN, berkontraksi 3,6% (yoy), terutama dipengaruhi oleh belum disalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026. Meski demikian, peran bansos tetap

sangat penting dalam menjaga perlindungan sosial dan daya tahan kelompok rentan. Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran PBI JKN sebesar Rp11,6 triliun bagi 96,7 juta peserta, PKH sebesar Rp7,3 triliun bagi 9,7 juta Keluarga Penerima Manfaat, Kartu Sembako sebesar Rp10,5 triliun bagi 17,5 juta KPM, KIP Kuliah sebesar Rp7,3 triliun bagi 773,3 ribu mahasiswa, serta asistensi, rehabilitasi sosial, dan penanggulangan bencana sebesar Rp0,8 triliun. Dengan komposisi seperti ini, bansos tetap menjadi bagian penting BPP dalam memastikan bahwa akselerasi fiskal tetap disertai perlindungan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain Belanja K/L, BPP juga diperkuat oleh Belanja Non-K/L yang menjangkau fungsi lebih luas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan kebijakan publik. Sampai dengan Triwulan I 2026, realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp329,1 triliun atau 20,1% APBN, tumbuh 51,6% (yoy), yang utamanya dipengaruhi oleh penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi. Realisasi ini terutama dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun, penyaluran subsidi, serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik. Dengan demikian, Belanja Non-K/L

menjadi komponen penting yang melengkapi Belanja K/L, terutama dalam menjaga stabilitas, daya beli, dan kesinambungan dukungan fiskal di tengah dinamika harga energi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pada komponen Belanja Pegawai Non-K/L, realisasi Triwulan I 2026 mencapai Rp64,6 triliun atau 28,9% APBN, tumbuh 3,7% (yoy). Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pensiunan sebanyak 110 ribu orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun, termasuk THR, kepada pensiunan ASN/TNI/POLRI. Dalam konteks kebijakan fiskal, belanja ini menunjukkan kesinambungan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban kepada aparatur yang telah menyelesaikan masa baktinya, sekaligus menjaga konsumsi kelompok pensiunan tetap terdukung.

Sementara itu, Belanja Subsidi dan Kompensasi pada Triwulan I 2026 mencapai Rp118,7 triliun atau 26,6% APBN, tumbuh 266,5% (yoy). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik. Dari jumlah tersebut, Subsidi Energi



Foto: Tri Radite Priambodo

teralisasi sebesar Rp24,5 triliun, yang mencakup subsidi BBM sebesar Rp3,6 triliun, subsidi LPG Tabung 3 kilogram sebesar Rp6,5 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp14,4 triliun. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran 3,2 juta kiloliter BBM bersubsidi, 1,4 juta ton metrik LPG Tabung 3 kilogram, serta listrik bersubsidi bagi 42,9 juta pelanggan. Kinerja ini mencerminkan bahwa di tengah tekanan harga energi global, APBN tetap menjalankan perannya sebagai pelindung daya beli masyarakat dan penyangga stabilitas ekonomi.

Pada saat yang sama, Subsidi Non-Energi mencapai Rp27,7 triliun, yang terdiri atas Subsidi Pupuk sebesar Rp25,1 triliun dan Subsidi Bunga Kredit Program

sebesar Rp2,7 triliun. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk subsidi bunga KUR kepada 1,1 juta debitur dengan realisasi penyaluran KUR sebesar Rp68,6 triliun, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 1,9 juta ton. Adapun kompensasi terealisasi sebesar Rp66,5 triliun, yang terdiri atas kompensasi tahun anggaran berjalan sebesar Rp22,4 triliun dan utang kompensasi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp44,1 triliun. Susunan ini menunjukkan bahwa Belanja Non-K/L tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga menopang sektor produktif seperti pertanian dan UMKM melalui dukungan pembiayaan dan subsidi yang lebih luas.

Realisasi BPP pada Triwulan I 2026 menunjukkan bahwa APBN terus diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja dan memastikan manfaatnya semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. BPP tidak hanya menjadi instrumen untuk membiayai operasional negara, tetapi juga menjadi sarana untuk mempercepat prioritas pembangunan, menjaga daya beli, mendukung layanan publik, dan menopang pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks inilah, peran BPP selanjutnya dapat dilihat lebih jauh melalui perspektif alokasinya pada berbagai sektor fundamental atau tematik, dan kemudian melalui dukungannya terhadap Program Prioritas Pemerintah atau program unggulan.



Foto: Bachrul Risdan Pratomo

Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD

Tetap Kuat Dukong Layanan Publik Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen penting dalam APBN untuk memastikan agar manfaat kebijakan fiskal dapat hadir secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Melalui TKD, Pemerintah mendukung kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik, memperkuat pembangunan, menjaga kesinambungan program prioritas, serta merespons kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik masing-masing daerah. Dalam konteks ini, TKD tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer anggaran dari pusat ke daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah agar pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan yang inklusif dapat berjalan lebih seimbang di seluruh Indonesia.

Realisasi TKD pada Triwulan I 2026 mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5% APBN. Secara tahunan, realisasi ini berkontraksi 1,1% (yoy), terutama karena adanya pengalihan anggaran TKD pada tahun 2026. Meskipun demikian, dari sisi kualitas penyaluran,

capaian TKD pada triwulan ini tetap menunjukkan kinerja yang baik. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin baiknya pemenuhan syarat salur dan membaiknya kinerja penyaluran oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan demikian, TKD tetap berperan penting dalam memastikan kehadiran layanan publik di daerah berjalan dengan baik dan manfaat APBN dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah.

Dana Bagi Hasil

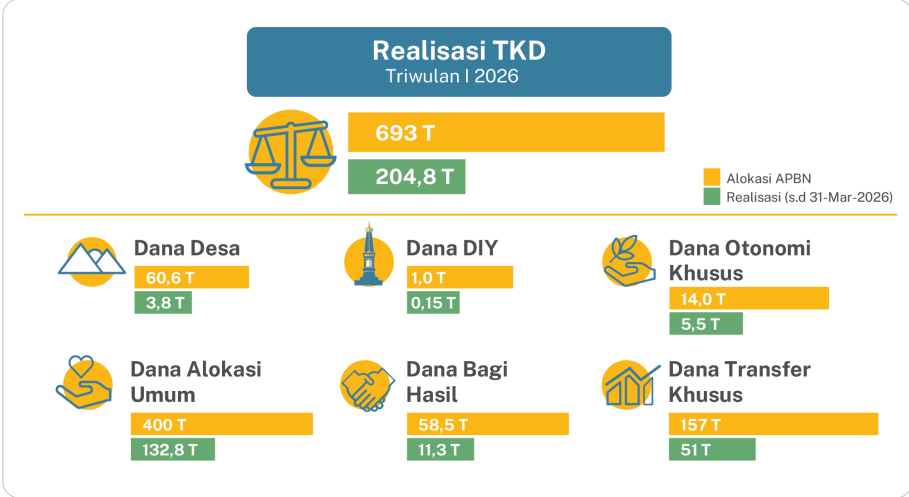
Sampai dengan Triwulan I 2026, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) secara keseluruhan telah mencapai Rp11,3 triliun atau 19,4% APBN. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, capaian ini menunjukkan perbaikan, terlihat dari realisasi yang meningkat menjadi 19,4% APBN, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 16,32%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyaluran DBH pada awal tahun berlangsung relatif lebih baik, ditopang oleh kebijakan relaksasi penyaluran DBH reguler yang

dapat disalurkan langsung tanpa syarat, tambahan alokasi DBH, serta penyaluran sebagian kurang bayar DBH untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan kebijakan ini, TKD tidak hanya menjalankan fungsi transfer fiskal rutin, tetapi juga hadir sebagai instrumen yang responsif terhadap kebutuhan pemulihan daerah.

Sebagai bentuk dukungan kepada Pemda dalam mempercepat pemulihan pascabencana, Pemerintah juga melakukan penyesuaian berupa penambahan pagu alokasi DBH tahun 2026 untuk 78 daerah terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan nilai total Rp2,9 triliun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Tambahan tersebut terdiri atas penambahan alokasi DBH tahun anggaran 2026 sebesar Rp0,8 triliun dan penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2024 sebesar Rp2,1 triliun, yang disalurkan dalam tiga tahap. Sampai dengan Maret 2026, tambahan alokasi DBH telah disalurkan tahap I dan tahap II dengan total Rp0,6 triliun atau 72,7%, sedangkan penyaluran kurang bayar DBH juga telah terealisasi tahap I dan tahap II sebesar Rp1,5 triliun atau 71,4%. Penyaluran tahap III pada April diharapkan menjaga tren positif penyaluran DBH pada triwulan berikutnya dan mempercepat pemulihan, rekonstruksi, serta keberlanjutan layanan publik di daerah terdampak bencana.

Dana Alokasi Umum

Sebagaimana lazimnya dalam struktur TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi komponen dengan alokasi terbesar. Pada Triwulan I 2026, realisasi penyaluran DAU mencapai Rp132,8 triliun atau 33,2% APBN. Meskipun alokasi DAU tahun 2026 lebih kecil dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp427,7 triliun, capaian realisasi pada awal tahun justru



lebih baik dibandingkan capaian tahun 2025 yang sebesar 28,1% dari pagu pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kinerja yang lebih baik ini terutama didukung oleh meningkatnya kepatuhan Pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur DAU. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola penyaluran mulai berdampak pada akselerasi realisasi transfer ke daerah.

Sejalan dengan dukungan yang diberikan melalui DBH, Pemerintah juga menambah pagu alokasi DAU tahun 2026 untuk 78 daerah terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp7,6 triliun. Tambahan alokasi ini merupakan bagian dari percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian material yang signifikan. Sampai dengan Maret 2026, penyaluran tambahan DAU untuk daerah terdampak bencana tersebut telah terealisasi Rp5,3 triliun melalui penyaluran tahap I dan tahap II, sedangkan sisanya dijadwalkan disalurkan pada tahap III di bulan April 2026. Dengan demikian, DAU pada tahun ini tidak hanya berfungsi menopang kapasitas fiskal rutin daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan daerah dalam merespons kebutuhan pemulihan secara lebih cepat.

Dana Alokasi Khusus

Kinerja realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Triwulan I 2026 menunjukkan perkembangan yang sangat positif, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Realisasi DAK pada triwulan ini mencapai Rp51,0 triliun atau 32,5% APBN, meningkat cukup tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp39,5 triliun atau 23,7% APBN. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada kebijakan penyaluran DAK,



yang terutama didorong oleh penguatan mekanisme penyaluran DAK Nonfisik. Dalam konteks ini, DAK tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan sektoral, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja daerah melalui mekanisme penyaluran yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Perbaikan kualitas belanja tersebut terutama terlihat pada implementasi mekanisme baru penyaluran tunjangan profesi guru, yang pada tahun 2026 dapat dilakukan secara bulanan langsung ke rekening guru penerima di seluruh daerah. Percepatan ini berjalan seiring dengan penyempurnaan mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang juga disalurkan langsung kepada satuan pendidikan sebagai penerima manfaat. Kebijakan DAK Nonfisik bidang pendidikan dengan demikian dirancang untuk memberikan dampak yang lebih nyata terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan. Pada tahun 2026, BOS ditargetkan dapat dinikmati oleh 42,3 juta siswa, BOP PAUD mendukung 5,9 juta peserta didik, BOP Kesenakanaan untuk 1 juta peserta didik, dan tunjangan guru ditargetkan disalurkan kepada 1,8 juta guru. Susunan kebijakan ini memperlihatkan bahwa penyaluran DAK semakin diarahkan untuk memperkuat mutu layanan pendidikan melalui mekanisme yang lebih sederhana dan langsung menyentuh penerima manfaat.

Namun demikian, pada sisi pendanaan untuk infrastruktur layanan publik daerah yang

didukung melalui skema DAK Fisik, hingga akhir Triwulan I 2026 belum terdapat realisasi. Hal ini disebabkan belum adanya pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dari Pemda. Sementara itu, hibah ke daerah hingga Maret 2026 telah mencapai Rp0,2 triliun atau 0,1% APBN, yang relatif lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan progres implementasi proyek yang didanai melalui skema hibah. Dengan demikian, meskipun komponen fisik masih menunggu kesiapan administratif daerah, perkembangan di awal tahun tetap menunjukkan arah perbaikan dalam kualitas penyaluran TKD secara keseluruhan.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Pada Triwulan I 2026, penyaluran Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) terealisasi sebesar Rp5,6 triliun atau 39,7% APBN. Capaian ini menunjukkan kemajuan penyaluran yang sangat berarti, mengingat pada periode yang sama tahun 2025 belum terdapat realisasi. Perkembangan ini didorong oleh implementasi interoperabilitas tiga sistem utama pengelolaan Dana Otsus, yaitu SIKD, SIPPP, dan SIPD. Keterhubungan antarsistem tersebut berdampak pada percepatan penganggaran, penetapan APBD, dan pada akhirnya mempercepat penyaluran Dana Otsus. Ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola digital mulai menghasilkan manfaat nyata dalam pengelolaan fiskal daerah, khususnya untuk instrumen yang

memiliki karakteristik khusus seperti Dana Otsus.

Sementara itu, pada pos Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, sampai dengan 31 Maret 2026 terealisasi Rp0,1 triliun atau 15% APBN. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, meskipun pagu anggaran tahun ini lebih rendah, capaian realisasinya tetap sama. Kinerja penyaluran Dana Keistimewaan menunjukkan progres yang baik karena berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2025. Pada Triwulan I, implementasi Dana Keistimewaan DIY memperlihatkan akselerasi positif, terutama dalam penguatan fondasi kebudayaan dan pertanian, dengan realisasi fisik mencapai 10,01% dari target tahunan. Pemanfaatannya difokuskan pada pelestarian cagar budaya, Jogja Heritage Track, beasiswa pendidikan tinggi, pemeliharaan SPKL bus listrik, Festival hasil pertanian unggulan Perbukitan Menoreh, operasional petugas joko margo, reformasi kalurahan, hingga pembuatan patok dan pendaftaran pengukuran tanah desa. Dengan demikian, Dana Keistimewaan tidak hanya menopang fungsi administratif, tetapi juga memperkuat identitas, tata ruang, kelembagaan, dan pengelolaan pertanian di DIY.

Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal strategis yang dialokasikan Pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Memasuki tahun anggaran 2026, kebijakan Dana Desa terus disesuaikan agar semakin tepat sasaran dan semakin selaras dengan prioritas nasional, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai dengan kewenangan desa, meliputi penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan desa berketahanan iklim dan tanggap bencana, penyediaan

layanan dasar kesehatan termasuk pencegahan *stunting*, dukungan program ketahanan pangan, dukungan implementasi KDKMP, pembangunan infrastruktur desa melalui padat karya tunai, penguatan infrastruktur digital dan teknologi di desa, serta program prioritas desa lainnya. Dengan cakupan tersebut, Dana Desa tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa.

Selain itu, Pemerintah juga menambah kriteria Alokasi Afiriasi bagi desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana. Pada saat yang sama, untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih sehat, biaya operasional pemerintah desa tetap dibatasi paling banyak 3% dari total Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa setiap desa diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dengan formula yang didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan, dan potensi desa, serta mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Dana Desa terus diarahkan agar semakin adaptif terhadap kebutuhan riil desa, sekaligus tetap menjaga tata kelola yang sehat dan akuntabel.

Pada tahun anggaran 2026, besaran alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp60,6 triliun, yang terdiri dari Dana Desa Reguler sebesar Rp25 triliun dan Dana Desa untuk dukungan KDKMP sebesar Rp34,6 triliun. Dengan komposisi ini, sebagian besar Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan KDKMP sesuai amanat Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dan PMK Nomor 15 Tahun 2026. Hingga 31 Maret 2026, realisasi penyaluran Dana Desa reguler mencapai Rp3,8 triliun atau sekitar 15,4% dari total pagu Dana Desa reguler. Di sisi lain, Dana Desa untuk dukungan KDKMP belum tersalur karena masih dalam proses pembangunan gudang dan gerai KDKMP.

Penyaluran Dana Desa pada Triwulan I 2026 sebesar Rp3,8 triliun atau 6,4% dari total pagu Dana Desa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tersebut berkontraksi 80,6%, yang terutama disebabkan oleh penurunan pagu Dana Desa reguler dan belum adanya penyaluran Dana Desa untuk dukungan pembiayaan KDKMP. Dengan demikian, perkembangan Dana Desa pada awal tahun lebih mengindikasikan tahapan implementasi kebijakan baru dan perubahan struktur alokasi, bukan semata pelemahan dukungan fiskal kepada desa.



Foto: Andi Abdurrochim

Anggaran Tematik

Anggaran Tematik Percepat Pembangunan

Selain kelompok anggaran BPP dan TKD, pemerintah juga mengelompokkan anggaran secara tematik untuk mempertegas kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran Tematik dapat bersumber dari BPP, TKD maupun Pembiayaan. Anggaran Tematik yang dibentuk utamanya adalah pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Bidang Pendidikan

Belanja bidang pendidikan menjadi salah satu instrumen utama APBN dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pada Triwulan I 2026, realisasi Belanja Bidang Pendidikan mencapai Rp186,3 triliun atau 24,2% APBN, tumbuh 46,8% (yoy), yang dipengaruhi utamanya oleh pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kinerja ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menopang proses belajar-mengajar, tetapi juga semakin didorong untuk memperkuat kualitas peserta didik secara lebih menyeluruh, termasuk melalui intervensi gizi, dukungan operasional pendidikan, dan penguatan peran tenaga pendidik.

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan secara lebih utuh, mulai dari peserta didik, tenaga pendidik, hingga satuan pendidikan. Dukungan kepada siswa dan mahasiswa antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta MBG mencapai Rp58,3 triliun. Sementara itu, dukungan bagi

guru, dosen, dan tenaga pendidik melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non-ASN mencapai Rp67,7 triliun. Adapun dukungan untuk sekolah dan kampus melalui BOS, BOPTN, dan BOP PAUD mencapai Rp39,2 triliun. Dengan demikian, belanja pendidikan pada awal tahun tidak hanya menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas SDM yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Bidang Kesehatan

Belanja Pemerintah di bidang kesehatan terus diarahkan agar akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada Triwulan I 2026, realisasi Belanja Bidang Kesehatan mencapai Rp49,5 triliun atau 20,0% APBN, tumbuh 49,7% (yoy), yang dipengaruhi utamanya oleh program MBG serta Transfer ke Daerah (TKD) untuk kegiatan darurat dan rehabilitasi layanan kesehatan di kabupaten terdampak bencana di Sumatera. Kinerja ini menunjukkan bahwa belanja kesehatan tidak hanya fokus pada layanan rutin, tetapi juga responsif dalam menjawab kebutuhan yang bersifat mendesak, baik dari sisi pencegahan, penguatan layanan dasar, maupun pemulihan pascabencana.

Realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sarana dan prasarana kesehatan sebesar Rp20,6 triliun serta

layanan kesehatan masyarakat sebesar Rp25,1 triliun. Dalam konteks yang lebih luas, arah belanja kesehatan ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya hadir untuk membiayai fasilitas, tetapi juga menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan yang menjadi dasar kualitas hidup masyarakat. Dukungan pada layanan kesehatan, pemulihan daerah terdampak bencana, serta penguatan program prioritas seperti MBG memperlihatkan bahwa belanja kesehatan semakin terintegrasi dengan agenda pembangunan manusia dan perlindungan sosial.

Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi salah satu area tematik yang paling menonjol pada Triwulan I 2026. Realisasi Belanja Bidang Ketahanan Pangan mencapai Rp53,7 triliun atau 25,5% APBN, tumbuh 630,0% (yoy), yang dipengaruhi utamanya oleh realisasi pencairan investasi kepada Perum Bulog untuk pembelian beras dan gabah petani. Besarnya pertumbuhan ini menggambarkan kuatnya intervensi Pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan sejak awal tahun, sekaligus memperkuat sisi hulu dan hilir sistem pangan nasional. Dalam konteks ini, APBN tidak hanya berperan menjaga pasokan, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap petani, memperbaiki rantai pasok, dan menjaga stabilitas harga pangan.

Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk sarana dan prasarana pertanian sebesar Rp2,9 triliun, Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog sebesar Rp22,7 triliun, serta pengembangan tebu dan tanaman pangan sebesar Rp0,5 triliun. Selain itu, dukungan juga diarahkan pada rehab lahan, optimasi lahan, dan cetak sawah dengan target 300 ribu hektar, irigasi perpompaan dan perpipaian dengan target 18 ribu unit, serta bantuan alat mesin pertanian pra dan pasca-panen dengan target 45.316 unit. Susunan belanja ini

menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan urusan ketersediaan pangan, tetapi juga sebagai penguatan produktivitas, dukungan kepada petani, dan peningkatan efisiensi produksi di tingkat lapangan.

Realisasi Belanja Bidang Ketahanan Pangan tersebut dialokasikan dalam bentuk Belanja K/L sebesar Rp5,9 triliun, Subsidi Pupuk sebesar Rp25,1 triliun, serta Pembiayaan sebesar Rp22,7 triliun. Komposisi ini menunjukkan bahwa APBN menggabungkan instrumen belanja, subsidi, dan pembiayaan untuk menjaga ketahanan pangan secara lebih komprehensif. Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, penguatan sektor pangan juga tidak terlepas dari upaya menjaga keterkaitan antara pangan, energi, dan komoditas strategis nasional, termasuk pengelolaan sawit dan biodiesel yang terus menjadi perhatian pemerintah.

Bidang Infrastruktur

Pemerintah terus menjaga komitmen dalam mendukung dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui kesinambungan pembangunan infrastruktur. Pada Triwulan I 2026, realisasi Belanja Bidang Infrastruktur mencapai Rp28,6 triliun atau 6,6% APBN, tumbuh 33,6% (yoy), yang dipengaruhi utamanya oleh percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, revitalisasi sekolah dan madrasah, penguatan infrastruktur ketahanan energi, serta peningkatan infrastruktur kesehatan. Kinerja ini

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap diposisikan sebagai dasar yang penting untuk memperkuat produktivitas, konektivitas, dan kualitas layanan publik.

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan, antara lain pembangunan bendungan sebesar Rp1,7 triliun dengan capaian 53,2% dari target 15 unit, pembangunan jaringan irigasi sebesar Rp358,1 miliar dengan capaian 10,5% dari target 212 ribu hektar, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air sebesar Rp367,8 miliar, serta cetak sawah dan optimasi lahan sebesar Rp15,6 miliar. Arah belanja ini menunjukkan bahwa infrastruktur pangan tidak hanya dibangun untuk kepentingan fisik semata, tetapi untuk memperkuat kemampuan produksi nasional, menjaga pasokan, dan menekan kerentanan terhadap gangguan cuaca maupun distribusi.

Pada infrastruktur perumahan dan fasilitas umum, belanja dimanfaatkan antara lain untuk Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp876,7 miliar, peningkatan rumah sakit berkualitas di kabupaten/kota melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebesar Rp1,3 triliun, infrastruktur pendukung rumah sakit sebesar Rp1,0 triliun, serta revitalisasi sekolah sebesar Rp1,7 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada konektivitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama pendidikan

dan kesehatan.

Pada infrastruktur konektivitas, belanja dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan dan preservasi jalan sebesar Rp4,8 triliun, dengan capaian pembangunan 19,2% dari target 50,5 ribu kilometer, pembangunan dan preservasi jembatan sebesar Rp466,4 miliar, dengan capaian pembangunan 12,5% dari target 587,8 meter, serta pembangunan jalan tol sebesar Rp1,5 triliun, dengan capaian pembangunan 21,8% dari target 27 kilometer. Sementara itu, pada infrastruktur ketahanan energi, belanja dialokasikan untuk pipa transmisi gas bumi ruas Dumai–Sei Mengkei sebesar Rp1,1 triliun dan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebesar Rp451,1 miliar. Dengan susunan belanja seperti ini, APBN memperlihatkan peran strategisnya dalam membangun konektivitas, menurunkan biaya logistik, memperkuat akses energi, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi aktivitas ekonomi dan investasi.

Anggaran Tematik pada Triwulan I 2026 memperlihatkan bahwa APBN tidak hanya bekerja sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai penggerak prioritas pembangunan yang lebih terarah. Melalui penguatan belanja pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur, Pemerintah berupaya memastikan bahwa percepatan belanja negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

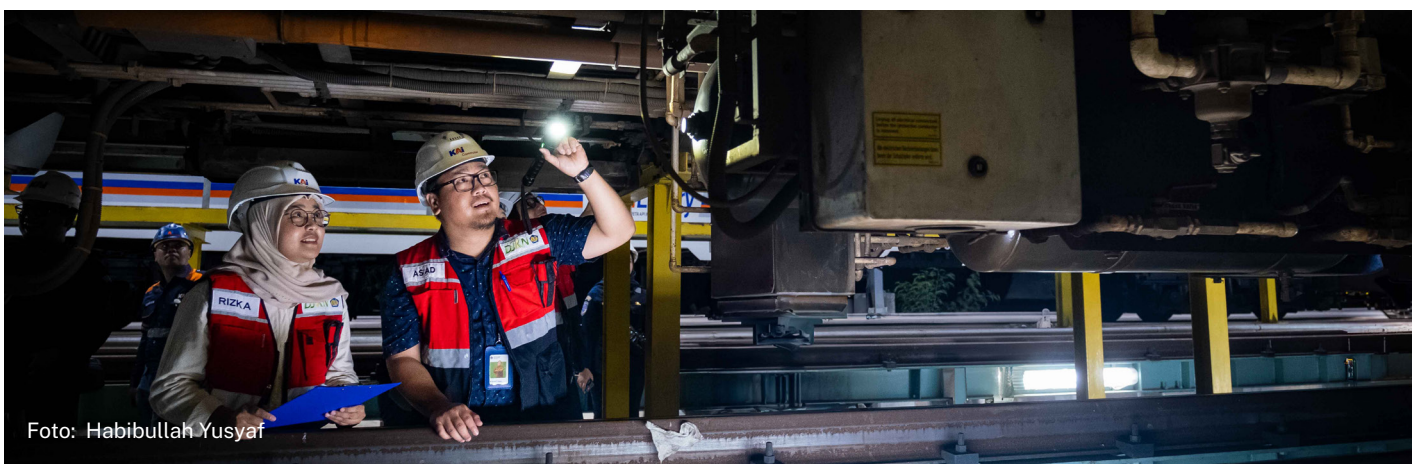


Foto: Habibullah Yusuf

Anggaran Tematik Bidang Infrastruktur

Realisasi Belanja Bidang Infrastruktur Triwulan I 2026 mencapai Rp28,6 triliun (6,6% APBN), tumbuh 33,6% (yoy)

Infrastruktur Ketahanan Pangan



Pembangunan bendungan
(53% dari target 15 unit)
Rp1,7 triliun



Pembangunan jaringan irigasi
(10% dari target 212 ribu hektar)
Rp358,1 miliar



Sarana dan prasarana sumber daya air
(5,7% dari rencana kegiatan)
Rp367,8 miliar



Cetak sawah dan optimasi lahan
Rp15,6 miliar

Infrastruktur Perumahan dan Fasilitas Umum



Sekolah Unggul Garuda
Rp876,7 miliar



Peningkatan rumah sakit berkualitas
melalui Program Hasil Terbaik Cepat
Rp1,3 triliun



Infrastruktur pendukung rumah sakit
Rp1,0 triliun



Revitalisasi sekolah (PAUD/SD/SMA)
Rp1,7 triliun

Infrastruktur Konektivitas



Pembangunan dan preservasi jalan
(19,2% dari target 50,5 ribu kilometer)
Rp4,8 triliun



Pembangunan dan preservasi jembatan
(12,5% dari target 587,8 meter)
Rp358,1 miliar



Pembangunan jalan tol
(21,8% dari target 27 kilometer)
Rp1,5 triliun

Infrastruktur Ketahanan Energi



Pipa transmisi gas bumi
ruas Dumai - Sei Mengkei
Rp1,1 triliun



Infrastruktur jaringan gas bumi
untuk rumah tangga
Rp451,1 miliar

Program Unggulan

Kegiatan Prioritas Berdampak Nyata Bagi Rakyat

Meningkatkan Kualitas Akses Layanan Menyongsong Generasi Emas

Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah melalui program pemberian MBG hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. MBG untuk anak sekolah dilakukan melalui pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. Dengan demikian anak-anak mampu menyerap ilmu pengetahuan dan informasi dengan lebih baik dan produktif, sehingga dapat membentuk kebiasaan anak untuk makan makanan sehat dan beragam serta memperbaiki daya tahan tubuh dengan gizi yang seimbang.

Realisasi belanja MBG pada Triwulan I 2026 mencapai Rp55,3 triliun (16,5% APBN), yang dipengaruhi utamanya oleh meningkatnya jumlah penerima manfaat. Sejak dimulainya program MBG pada tahun 2025, MBG telah diberikan kepada 61,79 juta penerima melalui 26.362 SPPG, dengan sebaran penerima berdasarkan pulau sebagai berikut: Pulau Sumatera sebanyak 12,66 juta orang penerima, Pulau Jawa sebanyak 35,57 juta penerima, Pulau Kalimantan sebanyak 2,63 juta orang penerima, Pulau Sulawesi sebanyak 4,50 juta orang penerima, Pulau Maluku-Papua sebanyak 2,89 juta penerima serta Pulau Bali-Nusa Tenggara sebanyak 3,53 juta orang penerima. Perluasan dan pemerataan penerima manfaat MBG akan terus dilakukan guna menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial yang merata dan optimal.



Foto: Benny

Sekolah Rakyat

Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Pemerintah menginstruksikan untuk membentuk dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat adalah wujud nyata peran negara dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, kehidupan, dan kesehatan yang berkualitas bagi siswa dari keluarga miskin.

Sekolah Rakyat menyelenggarakan pendidikan jenjang menengah unggulan yang tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter dan kepribadian luhur. Sebagai *Center of Excellence*, Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan inspirasi mental, mengembangkan intelektual melalui *excellence of thought* (keunggulan dalam pemikiran), dan *excellence of character* (keunggulan dalam karakter).

Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Realisasi belanja Sekolah Rakyat pada Triwulan I tahun 2026 mencapai Rp1,5 triliun (6,0% APBN). Realisasi Program Sekolah Rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah terealisasi sebesar Rp1,4 triliun yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Permanen. Adapun program Sekolah Rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah terealisasi sebesar Rp108 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan. Realisasi Sekolah Rakyat masih rendah antara lain disebabkan pembayaran Sekolah Rakyat tahap II dilakukan sesuai dengan termin dan belum adanya penunjukan lokasi Sekolah Rakyat tahap III. Realisasi Anggaran Sekolah Rakyat pada Kemensos akan meningkat pada Semester II sejalan dengan tambahan siswa baru tahun ajaran 2026/2027 dan beroperasinya 104 Sekolah Rakyat Permanen.

Sekolah Unggul Garuda (SUG)

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang adaptif dengan perkembangan teknologi, Pemerintah membangun Sekolah Unggul Garuda (SUG) yang sudah dimulai dari tahun 2025. Pembangunan SUG dapat menjangkau siswa-siswa berpotensi yang membutuhkan dukungan sarana ekosistem dari Pemerintah seperti sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta bimbingan dalam pembelajaran untuk memaksimalkan potensinya.

Realisasi belanja SUG pada Triwulan I 2026 mencapai Rp83,3 miliar (2,8% APBN). Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan SUG baru sebesar Rp82,9 miliar dan SUG Transformasi sebesar Rp0,4 miliar.

Pembangunan SUG baru Grup 1 (4 lokasi) yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kalimantan Utara telah melalui tahapan kontrak konstruksi dan pembangunan fisik.

Revitalisasi Sekolah dan Madrasah

Revitalisasi sekolah dan madrasah merupakan salah satu dari PHTC yang diluncurkan oleh Presiden. Program ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang ada dalam kondisi rusak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat keberadaan sarana dan prasarana merupakan penunjang penting dalam proses pembelajaran.

Realisasi belanja revitalisasi sekolah dan madrasah pada Triwulan I 2026 mencapai Rp1,6 triliun (9,3% APBN). Program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah terealisasi sebesar Rp1,3 triliun. Adapun revitalisasi madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah terealisasi sebesar Rp322,6 miliar. Sementara itu kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama telah terealisasi sebesar Rp3,5 miliar untuk sarana prasarana

pendukung.

Realisasi Anggaran Revitalisasi Sekolah dan Madrasah masih rendah disebabkan antara lain oleh program bersifat swakelola yang memerlukan proses dari penerimaan proposal, verifikasi, dan validasi sampai dengan proses transfer ke sekolah yang dilakukan secara bertahap.

Cek Kesehatan Gratis

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan kesehatan di Indonesia kini difokuskan tidak hanya pada aspek kuratif (pengobatan), tetapi juga pada penguatan upaya promotif dan preventif yang bersifat proaktif dan berkelanjutan. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu bentuk nyata dari intervensi promotif-preventif.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong deteksi dini penyakit, menekan beban pembiayaan kesehatan melalui intervensi sejak tahap awal terhadap penyakit kronis dan katastrofik, memperkuat layanan kesehatan dasar sebagai garda terdepan sistem kesehatan nasional, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat

dicegah.

Pelaksanaan program CKG di Indonesia dilaksanakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) layanan CKG yang dilaksanakan untuk anak usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas dengan lokasi pelaksanaan di puskesmas dan klinik; (2) layanan CKG sekolah, yang dilaksanakan untuk anak usia sekolah 7-17 tahun pada tahun ajaran baru dengan lokasi pelaksanaan di masing-masing sekolah; dan (3) layanan CKG ibu hamil dan balita, yang dilaksanakan sesuai jadwal dengan lokasi pelaksanaan di posyandu dan puskesmas. Pelayanan CKG diberikan secara menyeluruh untuk seluruh warga, sehingga bayi hingga lansia berhak mendapat pemeriksaan dasar minimal sekali setahun, tanpa biaya. Pelaksanaan CKG ini telah dimulai pada tanggal 10 Februari 2025.

Sampai dengan Triwulan I 2026, jumlah peserta CKG telah mencapai 17,8 juta peserta di seluruh Indonesia atau 13,5% dari target 131,8 juta jiwa. Pelaksanaan CKG masih menggunakan persediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang tersedia di Fasyankes sehingga masih belum terdapat realisasi anggaran yang menggunakan alokasi program CKG tahun 2026.



Foto: Dinas Kesehatan Bandung

Pembiayaan Utang

Pembiayaan Anggaran Terkendali

Mendukung APBN yang Kredibel dan Akuntabel

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang ekspansif, pembiayaan APBN 2026 didesain bukan sekadar untuk menutup defisit, tetapi juga memastikan agenda prioritas Pemerintah tetap berjalan dan menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai penopang kebutuhan fiskal jangka pendek, pembiayaan anggaran juga berperan dalam mendorong investasi produktif, menjaga kecukupan likuiditas pemerintah, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi ketidakpastian. Karena itu, kualitas pembiayaan menjadi semakin penting. Bukan hanya soal terpenuhinya target, tetapi bagaimana pembiayaan tersebut diperoleh—efisien dari sisi biaya, terkelola dari sisi risiko, dan tepat dari sisi waktu penerbitan. Hingga Triwulan I 2026, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp257,4 triliun atau 37,3% dari target APBN, terdiri atas Pembiayaan Utang sebesar Rp258,7 triliun dan Pembiayaan Non-Utang negatif Rp1,3 triliun. Realisasi ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBN tetap berjalan *on-track*, dengan ritme yang selaras antara kebutuhan kas negara dan kondisi pasar, merefleksikan pengelolaan yang pruden, efisien, dan kredibel.

Pembiayaan Utang: Terukur, Antisipatif, dan Adaptif terhadap Dinamika

Pembiayaan APBN 2026 terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang, terdiri dari kombinasi penerbitan SBN dan pengelolaan pinjaman, yang dikelola dengan menjaga

keseimbangan antara biaya dan risiko sekaligus mempertahankan fleksibilitas di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi.

Dalam implementasinya, pasar domestik tetap menjadi sumber utama pembiayaan melalui SBN, sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan nasional dan penguatan basis investor domestik. Sementara itu, penerbitan SBN dalam valuta asing dilakukan secara selektif sebagai pelengkap dan sarana diversifikasi sumber pembiayaan. Diversifikasi juga dilakukan melalui pengelolaan instrumen dan tenor secara aktif untuk mendukung pengembangan pasar sekaligus mengendalikan risiko utang. Dalam setiap keputusan penerbitan—baik domestik maupun valas—momentum pasar yang kondusif selalu menjadi pertimbangan agar efisiensi biaya tetap terjaga. Di sisi pinjaman, penarikan dilakukan selektif untuk kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kesiapan proyek, kebutuhan kas, serta target biaya dan risiko yang optimal.

Pada awal tahun 2026, pembiayaan utang dihadapkan pada dinamika eksternal yang cukup menantang. Eskalasi geopolitik dan kecenderungan pengetatan likuiditas global memicu peningkatan volatilitas pasar keuangan global, yang pada akhirnya memengaruhi sentimen investor terhadap pasar obligasi negara berkembang, termasuk SBN. Penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat serta kebijakan penyedia indeks global turut meningkatkan kehati-hatian pelaku pasar. Hasilnya, perilaku investor

bergeser dari yang sebelumnya lebih agresif menjadi lebih selektif dan sensitif terhadap harga, sehingga tantangan pembiayaan tidak hanya soal kemampuan memenuhi target, tetapi juga bagaimana menjaga efisiensi biaya di tengah tekanan yang meningkat.

Di tengah kondisi tersebut, realisasi pembiayaan utang hingga Triwulan I 2026 mencapai Rp258,7 triliun atau 31,1% dari target, berjalan sesuai rencana dengan pelaksanaan yang terukur dan antisipatif.

Penerbitan SBN di Pasar Perdana Tetap Solid

Di tengah dinamika yang menantang, Pemerintah terus memperkuat upaya untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar SBN melalui konsistensi kebijakan dan komunikasi aktif dengan pelaku pasar. Respons yang terukur terhadap berbagai penilaian lembaga internasional, didukung fundamental ekonomi yang solid—antara lain direfleksikan oleh resiliensi pertumbuhan ekonomi dan terjaganya defisit fiskal dalam batas aman—menjadi faktor penting dalam menjaga persepsi positif terhadap Indonesia. Sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas domestik turut memperkuat keyakinan pasar sehingga dapat menjaga stabilitas jangka pendek sekaligus membangun kredibilitas kebijakan jangka menengah.

Hasilnya terlihat antara lain dari kinerja pasar perdana SBN hingga Triwulan I 2026 yang terjaga dengan baik. Sepanjang Triwulan I 2026, kinerja lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tetap solid. Incoming bid terjaga dengan rata-rata *bid-to-cover ratio* relatif stabil meski dihadapkan pada tekanan geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan likuiditas domestik menjelang periode Ramadan dan Idulfitri. Minat investor terhadap

SBN tetap kuat dan kapasitas pasar domestik tetap memadai. Dinamika pasar memang menunjukkan penyesuaian perilaku investor yang lebih sensitif terhadap harga—tercermin dari tekanan pada beberapa lelang terakhir—namun rata-rata *Weighted Average Yield* (WAY) yang dimenangkan secara keseluruhan masih terjaga baik.

Partisipasi investor asing pada lelang SBN menunjukkan dinamika yang lebih moderat di awal tahun, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global. Aliran dana asing di pasar sekunder tercatat dinamis dengan beberapa periode *net outflow*, meski pada bulan April terjadi *net inflow* Rp3,6 triliun (ytd per 16 April 2026). Kepemilikan investor asing tetap terkonsentrasi pada tenor menengah hingga panjang, yang mencerminkan karakter investasi yang relatif berorientasi jangka panjang. Di sisi lain, peran investor

ritel, ORI029 yang diterbitkan pada Januari – Februari mencatat total penjualan Rp14,44 triliun dari 42.612 investor, termasuk lebih dari 15 ribu investor baru yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara. Dominasi investor milenial (46,8%) dan tingginya partisipasi perempuan (57,9%) menyiratkan bahwa SBN ritel tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana pendalaman pasar dan peningkatan inklusi keuangan.

Di samping pasar domestik, akses ke pasar global juga tetap terbuka. Pada Januari 2026, Pemerintah menerbitkan Global Bond senilai USD2,7 miliar dengan permintaan mencapai USD7,7 miliar, atau sekitar 2,9 kali dari jumlah yang ditawarkan, menandakan kepercayaan investor internasional yang solid terhadap Indonesia. Momentum ini berlanjut pada

Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA). Keberhasilan rangkaian penerbitan ini mencerminkan kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan momentum pasar secara tepat, di mana Pemerintah berhasil mengamankan sebagian pembiayaan saat likuiditas global masih mendukung, sehingga dapat memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mengelola pembiayaan pada periode berikutnya sekaligus membuktikan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap kokoh.

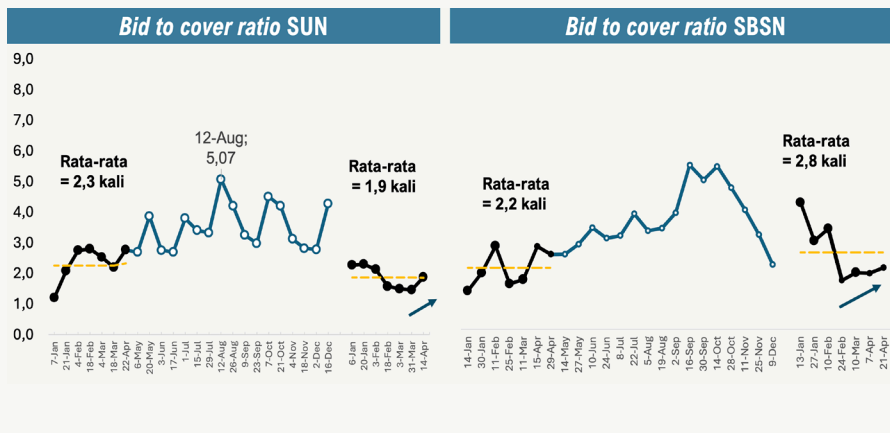
Realisasi Pinjaman Neto Terjaga

Di luar SBN, Pemerintah juga mengelola pembiayaan melalui pinjaman. Hingga Maret 2026, pinjaman neto tercatat negatif Rp16,8 triliun, terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri neto negatif Rp2,3 triliun dan Pinjaman Luar Negeri neto negatif Rp14,5 triliun. Realisasi negatif menunjukkan bahwa pada periode tersebut pembayaran kewajiban pokok pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru, sehingga terdapat penurunan jumlah *outstanding* pinjaman Pemerintah. Pembayaran kewajiban pokok secara tepat waktu menjadi indikator penting dalam menjaga kredibilitas fiskal, karena mencerminkan kemampuan dan komitmen Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya. Konsistensi dalam pembayaran ini turut memperkuat kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional, serta menjaga persepsi risiko Indonesia tetap terkendali di tengah dinamika global.

Menjaga Ketahanan Fiskal melalui Pengelolaan Kas dan Portofolio Utang yang Aktif

Terjaganya Pembiayaan Anggaran hingga Triwulan I 2026 tidak hanya didukung oleh strategi pembiayaan tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan kas Pemerintah. Melalui pendekatan *active cash and debt management*, Pemerintah menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas operasional dan efisiensi biaya secara simultan. Dalam konteks

Kinerja Lelang Surat Berharga Negara
Triwulan I 2026



domestik semakin menguat dalam menjaga stabilitas pasar. Hal ini ditunjukkan dari struktur kepemilikan SBN *domestic tradable* yang didominasi investor non-bank (54,6%), diikuti institusi pemerintah dan perbankan. Basis investor domestik yang luas dan beragam ini menjadi penyangga utama di tengah fluktuasi aliran dana global, memperkuat resiliensi pasar sekaligus mengurangi ketergantungan pada arus modal jangka pendek.

Resiliensi pasar domestik juga terkonfirmasi dari kinerja SBN

penerbitan SUN *dual currency* di pasar *offshore* Renminbi (CNH) dan Euro (EUR) pada Februari. Total penerbitan mencapai CNH9,25 miliar dan EUR2,7 miliar, dengan permintaan yang kuat—masing-masing mencatatkan *bid-to-cover ratio* sebesar 1,84 kali dan 3,5 kali—serta imbal hasil akhir yang efisien untuk semua tenor. Dari sisi komposisi investor, penerbitan CNH didominasi oleh investor perbankan terutama dari Kawasan Asia, sementara pada penerbitan EUR didominasi oleh *asset* dan *fund managers* di Kawasan

ini, Saldo Anggaran Lebih (SAL) berperan sebagai *buffer* fiskal yang memberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu pembiayaan, sehingga Pemerintah tidak harus mengakses pasar saat kondisi kurang kondusif yang berpotensi meningkatkan biaya. SAL bukan sekadar cadangan kas administratif, melainkan berperan sebagai instrumen stabilisasi yang memperkuat posisi tawar dalam pengelolaan pembiayaan.

Fleksibilitas tersebut diperkuat melalui pengelolaan portofolio utang secara aktif dengan langkah-langkah pengelolaan kewajiban untuk menjaga struktur utang tetap sehat dan berkelanjutan (*liability management*). Pada Januari 2026, salah satu upaya yang dilakukan adalah lelang pembelian kembali SUN melalui mekanisme *debt*

switch. Secara sederhana, *debt switch* merupakan penukaran SBN bertenor pendek dengan seri bertenor lebih panjang, yang bertujuan untuk merapikan profil jatuh tempo agar tidak terkonsentrasi pada periode tertentu. Langkah ini menekan refinancing risk, menjaga stabilitas biaya utang, dan memperkuat kesinambungan pembiayaan dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, pembiayaan APBN 2026 hingga Triwulan I menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal tetap berjalan secara pruden, adaptif, dan kredibel di tengah dinamika pasar keuangan global dan domestik yang menantang. Tekanan eksternal memang memengaruhi pasar keuangan, namun tidak mengganggu akses pembiayaan Pemerintah ke pasar. Hal ini terlihat

dari pasar perdana yang tetap solid, minat ritel yang kuat, akses pasar global yang tetap terbuka, serta indikator risiko pasar yang mulai membaik. Dengan strategi yang terukur, pengelolaan kas dan utang yang aktif, pemanfaatan *buffer* fiskal yang memadai, serta implementasi *liability management* yang konsisten, Pemerintah menjaga pembiayaan tetap *on-track* tanpa mengorbankan efisiensi biaya dan pengelolaan risiko. Pengelolaan pembiayaan yang pruden memastikan APBN terus berjalan dan pembiayaan negara dilakukan secara bertanggung jawab, mendukung pembangunan, serta tetap menjaga ketahanan fiskal untuk jangka menengah dan panjang.

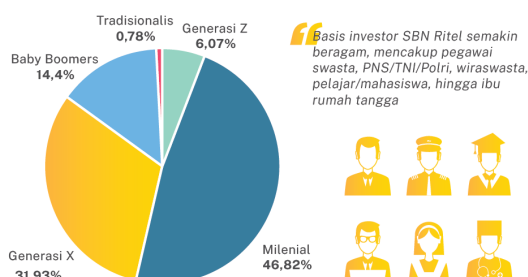
Kinerja Penerbitan Surat Berharga Negara Triwulan I 2026

Penerbitan SBN di pasar perdana tetap solid, Pemerintah terus memperkuat upaya untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar SBN

Keberhasilan rangkaian penerbitan ini mencerminkan kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan momentum pasar secara tepat, sekaligus membuktikan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap kokoh

ORI029

Total Penerbitan
Rp14,44 triliun
dari 46.612 investor



Global Bond USD2,7 miliar

13 Januari 2026

Tenor 5 Tahun	Tenor 10 Tahun	Tenor 30 Tahun
USD 1,1 miliar Yield 4,400%	USD 1,1 miliar Yield 5,000%	USD 500 juta Yield 5,500%

Dim Sum Bond CNH9,25 miliar

25 Februari 2026

Tenor 3 Tahun	Tenor 5 Tahun	Tenor 10 Tahun
CNH 4,5 miliar Yield 2,450%	CNH 3,5 miliar Yield 2,650%	CNH 1,25 miliar Yield 3,050%

Euro Bond EUR2,7 miliar

25 Februari 2026

Tenor 8 Tahun	Tenor 12 Tahun	Tenor 20 Tahun
EUR 1,2 miliar Yield 4,104%	EUR 800 juta Yield 4,473%	EUR 700 juta Yield 4,982%

Pembiayaan Investasi

Akselerasi Investasi Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan, Penguatan Sektor Lingkungan Hidup, serta Penguatan Sektor Infrastruktur

Pada tahun 2026, kebijakan pembiayaan investasi pemerintah diarahkan untuk memastikan pemanfaatan uang negara dilakukan secara terukur, hati-hati, dan berorientasi pada manfaat jangka menengah dan panjang bagi masyarakat. Kebijakan ini menekankan kualitas pemanfaatan investasi dan ketepatan sasaran, terutama dalam mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Pembiayaan investasi digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi, menjaga keberlanjutan program publik, serta mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok menengah dan rentan. Fokus pembiayaan investasi pada Triwulan I 2026 diarahkan untuk sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah di sektor pangan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi pengeluaran investasi tercatat sebesar Rp29,31 triliun. Dana tersebut terutama dimanfaatkan untuk penguatan cadangan pangan melalui Perum Bulog

sebesar Rp22,73 triliun untuk cadangan beras dan jagung, pembiayaan investasi kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp5,58 triliun dan pembiayaan kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk penanggulangan bencana (*pooling fund bencana*) sebesar Rp1 triliun.

Sektor Pangan

Dalam rangka menjaga stabilitas pangan, pemerintah telah mengalokasikan dana investasi non permanen kepada Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun. Melalui Perum Bulog, telah terealisasi pembiayaan sebesar Rp16,9 triliun untuk pengadaan 12,04 ribu ton beras dan 2,58 juta ton gabah, sesuai target yang ditetapkan. Dukungan ini diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan penyerapan hasil produksi petani dan harga pangan di tingkat konsumen.

Investasi kepada Bulog ini merupakan instrumen strategis yang secara simultan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menstabilkan harga jual agar terjangkau bagi masyarakat, serta menjamin ketersediaan beras dalam negeri.

Sektor Infrastruktur

Pada Triwulan I 2026, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi melalui LMAN untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp5,58 triliun. Sampai dengan 31 Maret 2026, realisasi investasi LMAN sudah disalurkan untuk pendanaan lahan PSN, dengan output berupa 1.913 bidang tanah dan 205 non bidang dengan luasan 1.763.478 m².

Investasi ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan akses terhadap layanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sektor Lingkungan Hidup

Guna mewujudkan ketahanan fiskal atas ancaman bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana, pemerintah memberikan pembiayaan investasi kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk dana penanggulangan bencana (*pooling fund bencana*) sebesar Rp1 triliun. Investasi ini akan dikelola dengan penempatan dana pada instrumen deposito, Surat Berharga Negara, dan/atau Obligasi Korporasi. Hasil kelolaan dana investasi akan digunakan untuk pembiayaan premi asuransi BMN sebesar Rp194,92 miliar dan kegiatan penanggulangan bencana sebesar Rp111,38 miliar pada tahun 2027, membiayai kebutuhan operasional serta diinvestasikan kembali pada instrumen jangka pendek dan/atau jangka panjang untuk memaksimalkan *idle cash*.



Foto: LMAN

Artikel Tematik

Kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Melalui berbagai program prioritas dan pembiayaan yang inovatif, APBN terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses kesempatan, dan memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing. APBN menjaga ekonomi tetap tumbuh, dan memastikan memberikan manfaat sebesar-sebarnya bagi rakyat.

APBNKITA

Akselerasi Penyaluran Tunjangan Hari Raya 2026 Perkuat Daya Beli dan Menjaga Momentum Ekonomi Triwulan I

Pemerintah terus mengoptimalkan peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui percepatan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pembayaran THR menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan cakupan yang luas dan tingkat penyelesaian yang tinggi di seluruh kelompok penerima. Akselerasi ini tidak hanya mencerminkan efektivitas tata kelola belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026.

Pada Pemerintah Pusat, realisasi pembayaran THR telah mencapai Rp18,6 triliun kepada 2.502.246 aparatur negara. Komposisi pembayaran menunjukkan dominasi PNS sebesar Rp10,4 triliun untuk 926.460 pegawai, diikuti oleh anggota POLRI sebesar Rp3,4 triliun untuk 489.708 personil dan prajurit TNI sebesar Rp3,4 triliun untuk 582.491 personil. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima Rp1.045,1 miliar untuk 429.807 pegawai, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebesar Rp345,3 miliar untuk 73.780 pegawai. Dari sisi kelembagaan, seluruh 98 K/L telah mengajukan pembayaran THR, dengan realisasi pada 8.892 satuan kerja.

Kinerja tersebut mencerminkan akselerasi yang signifikan sejak awal periode pembayaran. Dengan dimulainya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) THR sejak 4 Maret 2026 serta dukungan fleksibilitas layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), termasuk kemungkinan pembukaan layanan di luar hari kerja, proses pencairan dapat berlangsung lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan satuan kerja. Selain itu, integrasi sistem melalui aplikasi SAKTI serta pengaturan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang adaptif turut menjadi faktor kunci dalam meminimalkan *bottleneck* penyaluran.

Pada kelompok pensiunan, realisasi pembayaran mencapai Rp12,2 triliun kepada 3.728.195 pensiunan atau sebesar 99,7%. Penyaluran melalui PT Taspen mencapai Rp10,7 triliun (99,7%), sementara melalui PT Asabri sebesar Rp1,5 triliun (99,6%). Tingginya tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa skema penyaluran terpusat melalui institusi pengelola pensiun mampu menjaga ketepatan waktu dan akurasi pembayaran.

Sementara itu pada Pemda, realisasi THR telah mencapai Rp20,8 triliun kepada 4.419.263 pegawai yang disalurkan oleh 537 dari 546 Pemda (98,6%). Capaian ini mencerminkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus menunjukkan kapasitas

fiskal daerah yang relatif terjaga dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai menjelang Idulfitri.

Secara agregat total penyaluran THR yang telah direalisasikan mencapai lebih dari Rp51,5 triliun. Besaran ini memberikan stimulus fiskal yang signifikan terhadap perekonomian, khususnya melalui kanal konsumsi rumah tangga yang secara historis menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan karakteristik pembayaran yang bersifat langsung kepada individu, THR memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang relatif cepat terhadap sektor perdagangan, transportasi, dan jasa.

Dari sisi analisis terdapat beberapa faktor utama yang mendorong kelancaran dan percepatan penyaluran THR tahun 2026. Pertama, kesiapan regulasi dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan lebih awal memberikan kepastian bagi satuan kerja dalam memproses pembayaran. Kedua, digitalisasi sistem pembayaran melalui aplikasi SAKTI meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proses administrasi. Ketiga, penguatan koordinasi antara KPPN dan satuan kerja, termasuk melalui monitoring intensif, mampu memitigasi potensi kendala operasional di lapangan. Keempat, fleksibilitas kebijakan, seperti pengecualian THR dari Rencana Penarikan Dana (RPD), turut mempercepat proses pencairan anggaran.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang tetap perlu menjadi perhatian. Meskipun tingkat realisasi telah tinggi, masih terdapat sebagian kecil Pemda yang belum sepenuhnya merealisasikan pembayaran THR. Selain itu, potensi risiko administratif seperti ketidaksesuaian data gaji atau keterlambatan pengajuan SPM tetap perlu diantisipasi melalui penguatan validasi dan pengawasan.

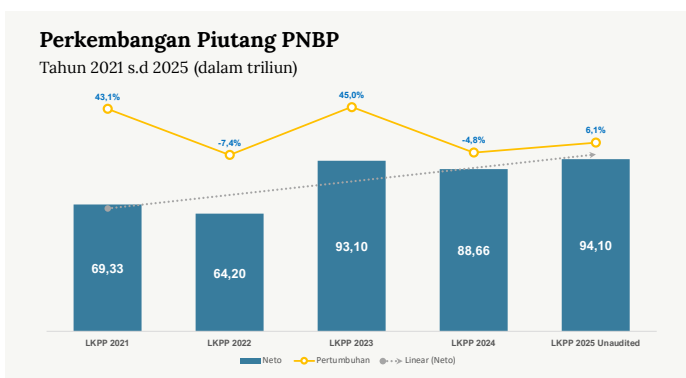
Ke depan percepatan penyaluran THR diharapkan dapat memberikan dorongan yang lebih kuat terhadap konsumsi domestik pada periode menjelang Idulfitri, sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan THR 2026 juga menjadi indikator penting efektivitas belanja negara dalam menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi.

Dengan capaian yang hampir menyeluruh dan dukungan sistem yang semakin terintegrasi, pelaksanaan THR 2026 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Mengunci Ketidapatuhan, Membuka Penerimaan: Strategi Automatic Blocking System (ABS) dalam PNPB



Piutang PNPB terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan utama tidak hanya terletak pada besarnya nilai piutang, tetapi pada komposisinya yang didominasi oleh piutang macet. Kondisi ini menandakan bahwa negara tidak hanya menghadapi kewajiban yang belum dibayar, tetapi juga menghadapi risiko menurunnya peluang penagihan seiring berjalannya waktu. Data menunjukkan bahwa piutang PNPB pada tahun 2024 meningkat 4,5% dibandingkan tahun 2023, dan kembali meningkat 16,3% pada tahun 2025. Tren ini memperlihatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang lebih kuat, beban piutang negara akan terus meningkat dan semakin sulit untuk diselesaikan.



Selama ini penagihan piutang PNPB cenderung mengandalkan pendekatan administratif seperti surat tagihan, teguran, dan peringatan. Namun, pendekatan tersebut sering kali tidak cukup efektif untuk mendorong kepatuhan, terutama ketika wajib bayar tetap dapat mengakses layanan atau menjalankan aktivitas usahanya tanpa hambatan. Dalam situasi ini, kewajiban kepada negara menjadi tidak memiliki konsekuensi langsung, sehingga inisiatif untuk segera membayar menjadi rendah. Kondisi tersebut menimbulkan ruang bagi *moral hazard* dan

memperlemah posisi negara dalam memastikan hak tagihnya terpenuhi.

ABS hadir sebagai salah satu instrumen dalam optimalisasi penyelesaian piutang negara, khususnya setelah tahapan penagihan administratif berupa teguran dan peringatan dilakukan. Dalam kerangka ini, ABS tidak dimaksudkan sebagai integrasi langsung dengan proses penagihan, melainkan sebagai mekanisme lanjutan yang memperkuat efektivitas penagihan melalui pembatasan akses layanan. Seluruh pendekatan penagihan pada dasarnya bersifat aktif, namun efektivitasnya ditingkatkan melalui penerapan langkah-langkah yang memiliki konsekuensi operasional langsung bagi wajib bayar, seperti penghentian layanan atau pemblokiran akses tertentu. Selain ABS, upaya penyelesaian piutang juga dapat dilakukan melalui tindakan yang bersifat lebih memaksa, antara lain penyitaan aset, termasuk yang terkait dengan pihak terafiliasi, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Keberadaan ABS juga memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2020 membuka ruang penghentian layanan bagi wajib bayar yang tidak memenuhi kewajiban. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam PMK Nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme teknis penghentian layanan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan SIMPONI. Selanjutnya, PMK Nomor 58 Tahun 2023 memperluas cakupan ABS, baik dari sisi kewenangan pengusulan maupun jenis piutang yang dapat ditangani, termasuk piutang negara lainnya. Dengan landasan ini, ABS tidak hanya menjadi inovasi kebijakan, tetapi juga bagian dari kerangka tata kelola yang memiliki legitimasi yang jelas.

Secara operasional, ABS bekerja melalui integrasi antara sistem layanan kementerian atau lembaga, SIMPONI, dan sistem layanan instansi lain. Ketika wajib bayar mengajukan layanan, sistem secara otomatis

melakukan identifikasi terhadap status kewajibannya. Jika terdapat piutang yang belum diselesaikan dan telah memenuhi syarat penagihan, maka akses terhadap layanan atau kode *billing* dapat diblokir. Mekanisme ini menjadikan penagihan lebih efektif karena berbasis sistem, bukan semata-mata berbasis dokumen. Negara tidak lagi menunggu respons wajib bayar, tetapi secara aktif menciptakan tekanan agar kewajiban segera dipenuhi.

Dalam konteks penerimaan negara, ABS merupakan bentuk *extra effort* yang sangat relevan. Optimalisasi penerimaan tidak selalu harus dilakukan melalui peningkatan tarif atau penciptaan jenis penerimaan baru. Upaya tersebut juga dapat dilakukan dengan memastikan bahwa penerimaan yang sudah menjadi hak negara benar-benar terealisasi. ABS berperan dalam memastikan bahwa piutang yang selama ini tertunda dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, ABS berfungsi sebagai instrumen penguatan *collection enforcement* yang secara langsung berdampak pada peningkatan realisasi PNBP.

Lebih jauh ABS juga berperan dalam memperbaiki kualitas pengelolaan piutang negara. Melalui proses verifikasi dan penetapan blokir, ABS membantu mengidentifikasi kondisi riil piutang. Dalam praktiknya, terdapat wajib bayar yang melunasi kewajiban sebelum blokir ditetapkan, terdapat pula piutang yang dikoreksi menjadi nihil, serta kasus-kasus lain seperti pailit atau belum terpenuhinya syarat administratif. Proses ini tidak hanya mendorong pembayaran, tetapi juga meningkatkan akurasi data piutang. Dengan demikian, ABS berfungsi sebagai alat penagihan sekaligus alat *cleansing data*.

Selain itu ABS memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan piutang negara. Sebelum piutang dinyatakan tidak dapat ditagih dan dihapuskan, negara perlu memastikan bahwa seluruh upaya penagihan telah dilakukan secara optimal. ABS memberikan bukti bahwa negara telah menempuh langkah penagihan yang lebih tegas dan terukur. Hal ini penting

dalam konteks tata kelola keuangan negara, karena penghapusan piutang harus didasarkan pada proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi kelembagaan ABS juga mendorong integrasi pengelolaan piutang lintas instansi. Selama ini, piutang negara tersebar dalam berbagai sistem dan kewenangan sektoral. Tidak semua kementerian atau lembaga memiliki kemampuan untuk melakukan pemblokiran layanan pada instansi lain. ABS menjembatani keterbatasan tersebut melalui peran Kementerian Keuangan sebagai koordinator fiskal yang dapat merekomendasikan pemblokiran lintas layanan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan piutang menjadi lebih terpadu dan tidak lagi terpisah-pisah.

Namun demikian implementasi ABS juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi. Peningkatan jumlah objek yang ditangani menuntut kapasitas sistem dan sumber daya yang lebih besar. Proses verifikasi yang masih bersifat manual dalam beberapa tahapan berpotensi memperlambat layanan, khususnya dalam proses pembukaan blokir. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam integrasi data, seperti penggunaan multi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan belum optimalnya identifikasi *beneficial owner*. Tantangan ini menunjukkan bahwa penguatan ABS tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga pengembangan sistem dan proses bisnis yang lebih efisien.

Ke depan arah pengembangan ABS difokuskan pada penguatan integrasi sistem, penggunaan *single identity* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta perluasan cakupan layanan yang dapat dikenakan pemblokiran. Penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi penuh menjadi kunci untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan. Dengan pengembangan tersebut, ABS diharapkan tidak hanya mampu menangani volume piutang yang semakin besar, tetapi juga mampu menjaga kualitas tata kelola penerimaan negara secara berkelanjutan.



Foto: Brahmantha Budya Bantala

Bea Cukai dan BNN Bongkar Laboratorium Narkoba Tersembunyi di Bali, Tangkap Dua WNA Rusia

Sinergi Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap laboratorium narkotika tersembunyi (*clandestine lab*) di Kabupaten Gianyar, Bali pada Maret 2026. Dalam operasi gabungan tersebut, aparat mengamankan dua Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia yang diduga memproduksi narkotika jenis Mefedron di sebuah vila. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia, sekaligus mendukung agenda Pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba.

Pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap arus barang lintas negara, termasuk barang kiriman yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan narkotika. Pengungkapan *clandestine lab* ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada narkotika dalam bentuk barang jadi, tetapi juga mencakup bahan kimia dan peralatan yang dapat digunakan dalam proses produksinya.

Kasus ini bermula pada 21 Januari 2026 ketika Bea Cukai Soekarno-Hatta menegah barang kiriman asal Tiongkok dengan tujuan Uluwatu, Bali. Paket tersebut berisi dua botol cairan yang diketahui mengandung zat Valerophenone dan 4'-Methylpropiophenone, yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim gabungan yang melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT (Bali Nusra), serta Bea Cukai Soekarno-Hatta yang bekerja sama

dengan BNN. Tim melakukan pendalaman informasi dan pengawasan terhadap pergerakan barang kiriman sejak 28 Januari hingga 5 Maret 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pengembangan, tim menemukan adanya sejumlah pengiriman peralatan laboratorium dan zat kimia, baik dari dalam maupun luar negeri, yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Barang-barang tersebut diduga digunakan untuk mendukung kegiatan produksi narkotika di sebuah vila di wilayah Bali.

Pada 6 Maret 2026, tim gabungan melakukan operasi pengungkapan dengan mengamankan seorang perempuan WNA asal Rusia. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat produksi narkotika.

Dari lokasi tersebut, aparat menemukan berbagai zat kimia dalam bentuk padat dan cair, serta narkotika golongan I jenis Mefedron. Secara bersamaan, tim juga mengamankan seorang pria WNA asal Rusia, di lokasi berbeda. Penggeledahan lanjutan turut menemukan zat kimia cair yang diduga terkait dengan proses produksi narkotika.

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas produksi narkotika, antara lain narkotika jenis Mefedron dalam bentuk kristal sebanyak 644 gram, Mefedron dalam bentuk cair setengah jadi sebanyak 7.250 mililiter, bahan kimia padat sebagai bahan baku pembuatan Mefedron sebanyak 2.600 gram, serta bahan kimia cair sebanyak 219.780 mililiter. Selain itu, petugas juga mengamankan 36 unit peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika.

Pengungkapan laboratorium narkotika ini dinilai menjadi langkah penting dalam memutus rantai produksi narkotika di dalam negeri. Keberadaan *clandestine lab* menunjukkan bahwa jaringan narkotika tidak hanya berupaya menyelundupkan narkotika dalam bentuk barang jadi, tetapi juga memproduksi di dalam negeri. Dengan pengungkapan ini, potensi peredaran narkotika yang dapat merusak masyarakat dapat dicegah sejak tahap produksi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci dalam menghadapi jaringan narkotika yang semakin kompleks dan lintas negara. Melalui pengawasan yang terintegrasi terhadap pergerakan barang, bahan kimia, serta peralatan laboratorium, diharapkan ruang gerak jaringan narkotika dapat semakin dipersempit sehingga masyarakat terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.



Coretax: Era Baru Administrasi Pajak yang Lebih Adil dan Transparan

Era baru sistem administrasi perpajakan telah bergulir setahun yang lalu dengan diluncurkannya Coretax. Tahun 2026 turut menjadi tonggak capaian (*milestone*) perjalanan Coretax yang tak kalah penting karena untuk pertama kalinya para wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2025 melalui Coretax (<https://coretaxdjp.pajak.go.id>).

Coretax hadir sebagai sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dengan mengintegrasikan sejumlah aplikasi yang sebelumnya terpisah-pisah. Oleh karena itu, Coretax menawarkan kepraktisan layanan perpajakan.

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa wajib pajak yang baru pertama kali menggunakan Coretax menghadapi tantangan. Hal ini tentu memerlukan waktu agar para wajib pajak lebih terbiasa dalam mengenal fitur dalam Coretax.

Di tengah periode libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri pada akhir Maret, Pemerintah pun tetap menjamin kemudahan wajib pajak orang pribadi, dengan memberikan relaksasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026. Kepdirjen tersebut mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi masih dapat melaporkan SPT Tahunan setelah jatuh tempo pada 31 Maret 2026, menjadi hingga 30 April 2026 tanpa dikenai sanksi administratif.

Kemudahan ini dapat mengatasi kendala pelaporan SPT tahunan, serta memberi cukup waktu bagi wajib pajak untuk terbiasa mengoperasikan Coretax. Sampai dengan 14 April 2026 sejumlah 11,22 juta wajib pajak telah berhasil melaporkan SPT tahunan menggunakan Coretax.

Wujudkan Administrasi Pajak yang Berkeadilan

Hadirnya Coretax bertujuan untuk membenahi administrasi dan layanan perpajakan. Dengan pertukaran informasi dan integrasi berbagai data khususnya data NIK menjadi NPWP, Coretax memudahkan pihak pemberi kerja, pemotong, dan/atau pemungut pajak membuat bukti potong terhadap seluruh lawan transaksi. Di sisi lain, lawan transaksi yang pajaknya telah dipotong/dipungut akan dapat menemukan bukti potongnya secara otomatis (*prepopulated*).

Dengan demikian, kepraktisan administratif ini memungkinkan para wajib pajak melaporkan SPT tahunannya dengan lebih mudah. Pada menu bukti potong, seluruh bukti potong telah tersedia secara otomatis. Kondisi ini berbeda dari aplikasi pelaporan pajak sebelumnya yang belum semua data bukti potongnya tersedia dalam *draft* SPT tahunan. Sehingga, wajib pajak masih perlu menginput bukti potong yang

Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh s.d 30 April 2026

Coretax Telah Memproses Pelaporan SPT Tahunan dengan Efektif

	Jumlah SPT	Nilai SPT Kurang Bayar	Nilai SPT Lebih Bayar
 Orang Pribadi Karyawan	10.743.907	Rp8,88 T  83%	-Rp0,16 T  -46%
 Orang Pribadi Non-Karyawan	1.438.498	Rp3,02 T  949%	-Rp0,07 T  -96%
 Badan	874.476	Rp50,21 T  18%	-Rp48,64 T  59%



-  Coretax mengintegrasikan proses perpajakan **end-to-end** dari administrasi, pelaporan, hingga pembayaran dalam satu sistem
-  **Pre-populated SPT berbasis integrasi data** memudahkan pelaporan serta meningkatkan kualitas dan akurasi data
-  **Pengawasan pajak lebih terukur dan tepat sasaran**, tercermin dari kenaikan nilai SPT Kurang Bayar

belum tersedia datanya secara manual.

Hal ini tentunya mendorong administrasi pajak yang adil, karena setiap transaksi telah dipastikan dipotong pajaknya sesuai ketentuan dan tak luput dari pelaporan karena bukti potong tersebut telah ter-*prepopulated*. Manfaat Coretax kini tidak hanya dirasakan pada sisi kemudahan layanan, tetapi juga mulai terlihat pada kualitas data perpajakan dan efektivitas pengawasan. Hingga 30 April 2026, sebanyak 13,1 juta SPT Tahunan PPh telah berhasil diproses melalui Coretax. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem baru ini mulai bekerja efektif dalam menopang administrasi perpajakan, terutama karena seluruh proses—mulai dari administrasi, pelaporan, hingga pembayaran—telah terhubung dalam satu sistem yang lebih terpadu.

Selain memudahkan wajib pajak, Coretax juga mendorong perbaikan kualitas data perpajakan. Melalui fitur *prepopulated* SPT berbasis integrasi data, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya dengan lebih mudah, sementara otoritas pajak memperoleh data yang lebih akurat, konsisten, dan dapat ditindaklanjuti. Perbaikan ini membuat pengawasan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran, yang tercermin dari meningkatnya nilai SPT Kurang Bayar pada wajib pajak orang pribadi karyawan sebesar 83%, non-karyawan 949%, dan badan 18%.

Dampak terhadap APBN: Penerimaan Pajak Meningkat

Penguatan pertukaran informasi, sinergi dengan berbagai institusi, dan tersedianya data bukti potong secara otomatis semakin mendukung peningkatan penerimaan pajak. Perbaikan administrasi dan kualitas data tersebut juga mulai terlihat pada kinerja penerimaan pajak. Pada Triwulan I 2026, penerimaan

pajak neto tumbuh 20,7% menjadi Rp394,8 triliun, dengan pertumbuhan yang kuat terutama pada PPN dan PPnBM serta PPh. Kinerja ini memang didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, namun pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa implementasi Coretax yang semakin baik mulai memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan administrasi, kepatuhan, dan akurasi penerimaan pajak.

Hal ini terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada Triwulan I 2026, yang mencapai 20,7% menjadi Rp394,8 triliun. Angka tersebut jauh di atas target pertumbuhan APBN 2026 sebesar 13,5%. Pertumbuhan pajak yang kuat, terutama pada PPN dan PPnBM serta PPh, dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax. Melalui arus pertukaran informasi yang semakin gencar, didukung dengan sinergi bersama berbagai institusi, dan data bukti potong yang otomatis tersedia, telah mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Menyongsong Optimisme

Kehadiran Coretax membawa angin segar dalam menghimpun penerimaan pajak yang lebih berkeadilan sekaligus memperkuat kualitas administrasi perpajakan. Melalui kemudahan layanan, integrasi data, dan pengawasan yang semakin terukur, wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Pada saat yang sama, negara memperoleh basis data dan sistem administrasi yang semakin kuat untuk mendukung penerimaan pajak yang lebih akurat, kredibel, dan berkelanjutan. Era baru administrasi pajak telah hadir, dan Coretax menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, adil, dan transparan.

MAU LAPOR SPT Pakai CORETAX

Tapi Belum Paham

Kami Dampingi Sampai Berhasil

t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT

www.pajak.go.id

Perempuan Mendominasi SBN Ritel

Digitalisasi dan Meningkatnya Literasi Keuangan Memperluas Partisipasi Perempuan dalam Pembiayaan Negara

Lebih dari seabad setelah R.A. Kartini menulis *Habis Gelap Terbitlah Terang*, perubahan itu kini hadir dalam keseharian. Semakin banyak perempuan Indonesia yang kian sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan. Tidak hanya mengatur, tetapi juga mengembangkan asetnya menjadi bernilai tambah. Perubahan ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi perempuan sebagai investor SBN ritel, yang tumbuh konsisten dan memberi dampak semakin luas.

Di balik pertumbuhan investor SBN ritel, ada satu perubahan yang berlangsung konsisten, yaitu meningkatnya peran perempuan. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, partisipasi perempuan tidak hanya bertambah, tetapi secara bertahap menjadi investor utama. Di tahun 2012, jumlah investor perempuan melampaui laki-laki pada penerbitan ORI009 dengan proporsi sebesar 50,69%. Sejak saat itu, tren ini terus berlanjut hampir di seluruh seri SBN ritel. Proporsi investor perempuan pun semakin menguat dari tahun ke tahun, bahkan dalam beberapa tahun terakhir stabil di kisaran 57–58%, baik pada SBSN maupun SUN. Di tahun 2025 misalnya, porsi investor perempuan mencapai sekitar 57,55% pada SBSN dan 57,93% pada SUN, yang berlanjut pada tahun 2026. Pada ORI029, investor perempuan mencapai 57,86%, sedangkan pada SR024 mencapai 57,16%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan kini menjadi bagian dominan dalam basis investor domestik.

Perkembangan ini semakin terakselerasi sejak 2018, seiring diluncurkannya platform SBN ritel berbasis digital (e-SBN). Sebelumnya, berinvestasi di SBN ritel mensyaratkan kehadiran fisik, proses administratif yang relatif panjang, dan akses informasi yang terbatas. Digitalisasi penerbitan SBN ritel pun mengubah proses pembelian menjadi lebih sederhana, dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, serta didukung oleh distribusi informasi yang semakin luas. Hambatan masuk yang sebelumnya cukup tinggi menjadi jauh lebih rendah, dan perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling cepat merespons perubahan ini.

Momentum tersebut berlanjut pada periode pandemi 2020–2022. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar keuangan, SBN ritel hadir sebagai instrumen yang menawarkan kepastian imbal hasil dan tingkat risiko yang lebih terjaga. Dalam periode ini, jumlah investor perempuan meningkat signifikan dan tetap konsisten melampaui laki-laki di hampir seluruh seri. Pola ini menunjukkan preferensi investor perempuan yang cenderung lebih berhati-hati terhadap risiko, lebih mengutamakan kepastian hasil dibanding potensi keuntungan tinggi, dan lebih konsisten dalam menjaga komitmen investasi bahkan di saat kondisi sedang mengalami tekanan.

Puncaknya kemudian terlihat pada 2024, ketika jumlah investor perempuan secara kumulatif telah menembus 1 juta investor. Angka ini tidak hanya

Semakin Banyak Perempuan Berinvestasi di SBN Ritel Sejalan dengan Meningkatnya Literasi Keuangan

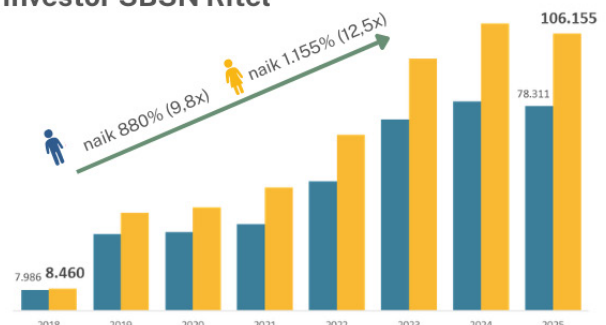
Investor SUN Ritel



Komposisi Investor SUN Ritel



Investor SBSN Ritel



Komposisi Investor SBSN Ritel



menjadi simbol pertumbuhan, tetapi juga menjadi penanda bahwa perempuan kini menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan negara melalui SBN ritel.

Preferensi Perempuan terhadap Tenor Pendek

Sejak Pemerintah menerapkan *dual tenor* pada sebagian besar seri SBN ritel mulai 2023, rata-rata proporsi investor perempuan pada tenor pendek (dua hingga tiga tahun) mencapai 58,8%, sementara pada tenor panjang (empat hingga enam tahun) angkanya turun ke 51,8%. Selisih sekitar tujuh poin persentase ini berulang konsisten di berbagai jenis instrumen, baik syariah maupun konvensional, serta instrumen yang dapat diperdagangkan maupun tidak. Pola ini mengindikasikan bahwa perempuan cenderung mengutamakan fleksibilitas likuiditas. Tenor yang lebih pendek memberikan ruang untuk menyesuaikan kebutuhan keuangan yang dinamis, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan keluarga.

Dari Berbagai Latar Belakang, Satu Arah yang Sama

Profil investor perempuan dalam SBN ritel juga semakin beragam. Hal ini menunjukkan bahwa SBN Ritel menjadi inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pegawai swasta secara konsisten menjadi kelompok terbesar baik pada instrumen SUN maupun SBSN. Pada instrumen SUN, kelompok wiraswasta berada sedikit di atas ibu rumah tangga, sementara pada instrumen SBSN, kelompok wiraswasta dan ibu rumah tangga yang bergantian di posisi kedua dan ketiga.

Ibu rumah tangga menjadi salah satu segmen yang menarik untuk dicermati. Bukan karena jumlahnya yang paling besar, tetapi karena konsistensinya. Tanpa bergantung pada struktur pendapatan formal, kelompok ini tetap hadir sebagai investor yang aktif dari tahun ke tahun. Pilihan terhadap SBN ritel merefleksikan pendekatan yang pragmatis terhadap instrumen yang aman, imbal hasil yang pasti, dan dapat diakses dengan nominal yang relatif terjangkau. Banyak di antara mereka memulai dari kebutuhan sederhana, seperti mengelola tabungan keluarga, menyiapkan dana pendidikan anak, atau sekadar menjaga nilai aset dari inflasi. Justru dari keputusan-keputusan kecil tersebut, pada akhirnya membentuk fondasi yang lebih luas, yaitu ketahanan finansial keluarga yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional.

Di sisi lain, investor perempuan dari kelompok pelajar dan mahasiswa mulai menunjukkan partisipasi yang semakin signifikan. Jumlah investor dari kelompok ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dari 3% pada SUN dan 6% pada SBSN di tahun 2018, menjadi 10% pada SUN dan 11% pada SBSN di tahun 2025. Tren ini menandakan bahwa kebiasaan berinvestasi mulai terbentuk lebih awal dibanding generasi sebelumnya, sekaligus menunjukkan bahwa SBN ritel tidak hanya menjangkau investor yang telah mapan, tetapi juga investor pemula.



Foto: KPPN Waingapu

Potensi kelompok ini juga besar untuk terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka akan memasuki dunia kerja dan memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk berinvestasi. Sebagian lainnya mungkin memilih peran yang berbeda, termasuk menjadi ibu rumah tangga, namun tetap memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam investasi baik melalui pengelolaan keuangan keluarga maupun dari berbagai sumber penghasilan nonformal yang semakin terbuka. Literasi dan kebiasaan yang telah terbentuk sejak dini menjadi modal yang penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam SBN ritel di masa depan. Lebih jauh lagi, kelompok ini berpotensi menjadi penghubung bagi generasi berikutnya. Perempuan yang telah memiliki pengalaman berinvestasi sejak muda cenderung akan mengenalkan pengelolaan keuangan kepada anak-anaknya di kemudian hari.

Peningkatan Literasi Keuangan dan Kapasitas Finansial Menjadi Faktor Pendukung

Pertumbuhan investor perempuan ini tidak terjadi begitu saja. Selain didorong oleh digitalisasi, peningkatan literasi keuangan menjadi faktor penting. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatat indeks literasi keuangan perempuan sebesar 66,75%, lebih tinggi dari laki-laki sebesar 64,14%. Demikian pula indeks inklusi keuangan perempuan lebih tinggi, 76,08% berbanding 73,97%. Capaian ini tidak lepas dari berbagai program edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan aktif mendorong literasi keuangan melalui berbagai kanal, mulai dari edukasi publik, kampanye inklusi keuangan, hingga kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat dan komunitas.

Di sisi lain, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja turut memperluas kapasitas finansial untuk berinvestasi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 51,80% pada 2018 menjadi 56,42% pada 2024. Semakin banyak perempuan yang memiliki penghasilan sendiri berarti semakin besar pula ruang untuk mengelola dan mengembangkan aset keuangan. Dalam hal ini, SBN ritel hadir sebagai pilihan yang paling sesuai dengan karakteristiknya yang aman, menguntungkan, dan mudah diakses dari genggaman.

Lebih dari Investasi: Stabilitas untuk Keluarga dan Negara

SBN ritel menawarkan keunggulan yang sulit diabaikan. Pertama, pokok dan imbal hasil dijamin negara, memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Kedua, imbal hasil yang kompetitif, di mana secara historis lebih tinggi dibanding deposito perbankan, dengan tarif PPh atas kupon SBN hanya 10%, separuh dari tarif PPh atas deposito yang dikenakan 20%. Ketiga, akses yang mudah dan nominal investasi yang terjangkau mampu memperluas jangkauan partisipasi.

Namun bagi banyak investor perempuan, nilai SBN ritel tidak berhenti pada aspek finansial. Instrumen ini juga memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan. Dengan kupon yang stabil dan jadwal pembayaran yang jelas, kebutuhan seperti dana

pendidikan, dana darurat, atau persiapan jangka menengah dapat direncanakan dengan lebih terukur.

Pada saat yang sama, setiap rupiah yang diinvestasikan langsung masuk ke pembiayaan APBN untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta program prioritas lainnya akhirnya kembali dirasakan masyarakat.

Semakin beragam dan semakin luas basis investor domestik, semakin tangguh negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa bergantung pada sentimen asing. Perempuan Indonesia adalah bagian dari fondasi itu. Kartini menulis surat-surat yang mengubah cara pandang bangsa tentang perempuan. Hari ini, perempuan Indonesia menulis sejarah yang berbeda — tidak dengan pena, tapi dengan transaksi. Satu per satu, seri demi seri, mereka turut membangun negeri.



Foto: Abdulla Hafeez

APBNKITA

KINERJA DAN FAKTA

